

NOTA DINAS
Nomor 25/IJ-IND.2/PW/I/2025

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Inspektorat I
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 31 Januari 2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tanggal 29 November Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2024 Unit Inspektorat I.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak Inspektur Jenderal kami ucapkan terima kasih.

Inspektur I, 

Dewi Setiawati

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Inspektorat I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I dalam menjalankan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penyusunan laporan ini juga merupakan pelaksanaan dari berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai capaian kinerja serta hasil analisis pengukuran kinerja Inspektorat I, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada tahun-tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat I yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan serta berkontribusi dalam pengembangan sektor industri nasional.

Akhir kata, kami memohon bimbingan dan dukungan dari semua pihak agar Inspektorat I dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam setiap langkah yang kita tempuh.

Jakarta, Januari 2025
Inspektorat I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat I	5
B. Peran Strategis Inspektorat I	6
C. Struktur Organisasi.....	7
BAB II	11
A. Rencana Strategis Inspektorat I.....	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	19
C. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	24
D. Dokumen Penetapan Kinerja.....	25
BAB III	30
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	30
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	58
BAB IV.....	61
PENUTUP.....	61
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN	61
B. PERMASALAHAN DAN KENDALA	62

DAFTAR BAGAN

<i>Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat I</i>	7
<i>Bagan 2. Peta SDM Inspektorat I</i>	8
<i>Bagan 3. Peta Strategi Inspektorat Jenderal</i>	11
<i>Bagan 4. Matrik Indikator Tujuan</i>	12
<i>Bagan 5. Matrik Renstra Inspektorat I</i>	13
<i>Bagan 6. Peran APIP</i>	21
<i>Bagan 7. Peta SDM Inspektorat I. Rencana Kinerja Inspektorat I Tahun 2024</i>	22
<i>Bagan 8. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2024 (revisi 13)</i>	24
<i>Bagan 9. Rincian Akun Anggaran Inspektorat I Tahun 2024</i>	24
<i>Bagan 10. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024</i>	26
<i>Bagan 11. Rencana Aksi Tahun 2024</i>	27
<i>Bagan 12. Realisasi Indikator Tujuan</i>	30
<i>Bagan 13. Perbandingan Level MRI</i>	31
<i>Bagan 14. Realisasi dan Temuan BPK BPSDMI dan Sekjen</i>	32
<i>Bagan 15. Pencapaian 5 tahun terakhir</i>	33
<i>Bagan 16. Pengaduan Masyarakat</i>	34
<i>Bagan 17. 5 tahun terakhir</i>	36
<i>Bagan 18. Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat 1</i>	36
<i>Bagan 19. Pencapaian 5 tahun terakhir</i>	39
<i>Bagan 20. Pencapaian 5 tahun terakhir</i>	41
<i>Bagan 21. Pencapaian 5 tahun terakhir</i>	42
<i>Bagan 22. Pencapaian 5 tahun terakhir</i>	44
<i>Bagan 23. Data Realisasi Inspektorat 1</i>	45
<i>Bagan 24. Pencapaian 5 tahun terakhir</i>	46
<i>Bagan 25. PKPT Penugasan Inspektorat I</i>	47
<i>Bagan 26. Pencapaian 5 tahun terakhir</i>	48
<i>Bagan 27. Data Pelaksanaan PKPT</i>	49
<i>Bagan 28. Pencapaian 5 tahun terakhir</i>	50
<i>Bagan 29. Realisasi Sasaran Strategis</i>	51
<i>Bagan 30. Realisasi Sasaran Strategis</i>	52
<i>Bagan 31. Capaian Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan</i>	54
<i>Bagan 32. Capaian Output Kinerja 2024</i>	58
<i>Bagan 33. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2023 dan 2024</i>	59
<i>Bagan 34. Matriks efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan perjanjian kinerja dapat dilihat melalui matrik berikut ini:</i>	60

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Latar Belakang

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas Inspektorat I dalam melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program di lingkungan Kementerian Perindustrian sepanjang tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator strategis yang mencerminkan efektivitas pengendalian internal, transparansi, serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengawasan.

2. Capaian Kinerja Utama

A. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) mencapai 3,688, melampaui target 3,00, menunjukkan peningkatan dalam manajemen risiko berbasis risk-based audit.
- Batas toleransi temuan material hasil pemeriksaan BPK ditekan hingga 0,05%, jauh di bawah batas maksimum 0,8%, mencerminkan efektivitas dalam pencegahan penyimpangan keuangan.

B. Efektivitas Pengawasan Internal

- 100% pengaduan masyarakat dengan kadar pengawasan telah ditindaklanjuti melalui SP4N-LAPOR!, membuktikan transparansi dan respons cepat terhadap laporan publik.
- 98,73% rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti, menunjukkan efektivitas pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan dan tata kelola keuangan unit kerja.
- Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) diterapkan secara penuh (100%), melampaui target 80%, meningkatkan efisiensi serta akurasi proses audit.

C. Akuntabilitas dan Efisiensi Keuangan

- Realisasi anggaran Inspektorat I Tahun 2024 menunjukkan efektivitas tinggi, dengan Pagu DIPA Rp 3.450.000.000,- dan blokir pagu Rp 470.000.000,-, sehingga anggaran yang dapat direalisasikan mencapai Rp 2.979.999.973,-. Hingga akhir tahun, persentase realisasi mencapai 99,99%, mencerminkan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung program pengawasan dan evaluasi yang direncanakan.
- Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari realisasi hampir 100%, setelah mengesampingkan blokir pagu, menunjukkan bahwa perencanaan dan eksekusi anggaran telah dilakukan secara cermat dan akurat sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 100% penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, mendukung kebijakan nasional dalam mendorong industri domestik.

3. Permasalahan dan Kendala

- Perubahan regulasi yang cepat memerlukan penyesuaian strategi pengawasan dan peningkatan pemahaman unit kerja terkait kebijakan baru.
- Kurangnya integrasi teknologi pengawasan, meskipun TABK telah diterapkan, pemanfaatannya dalam analisis big data dan sistem pemantauan masih perlu diperkuat.
- Efektivitas implementasi rekomendasi pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola satuan kerja.
- Jumlah auditor masih perlu diperkuat, serta perlu peningkatan keterampilan auditor dalam analisis risiko dan pemanfaatan teknologi audit.

4. Rekomendasi dan Strategi Perbaikan

- Peningkatan pemanfaatan teknologi pengawasan, termasuk integrasi sistem pemantauan digital dan penggunaan big data dalam analisis keuangan.
- Optimalisasi tindak lanjut rekomendasi pengawasan, dengan sistem pemantauan real-time untuk memastikan efektivitas implementasi rekomendasi.
- Peningkatan kapasitas SDM, melalui pelatihan sertifikasi untuk meningkatkan keahlian auditor dalam manajemen risiko dan teknologi audit.
- Memperkuat koordinasi dengan unit kerja dan kementerian terkait, agar kebijakan pengawasan lebih efektif dan implementatif.

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat I Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif, terutama dalam peningkatan manajemen risiko, efektivitas pengawasan, efisiensi keuangan, dan optimalisasi teknologi audit. Namun, masih terdapat ruang perbaikan dalam penguatan integrasi sistem digital, efektivitas implementasi rekomendasi pengawasan, dan pengembangan kapasitas SDM.

Dengan strategi yang tepat, Inspektorat I dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian ini guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam memperkuat industri nasional.

Inspektur I,



Dewi Setiawati

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat I

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Peran Strategis Inspektorat I

Inspektorat I memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) serta 28 satuan kerja vertikal, yang mencakup 9 satuan kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 12 satuan kerja Politeknik, dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri (BDI).

Sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal, Inspektorat I berfungsi untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta program strategis di sektor pengembangan sumber daya manusia industri. Peran ini mencakup:

1. Pengawasan Tata Kelola
 - Melakukan reviu atas kebijakan, sistem, dan prosedur yang diterapkan di Sekretariat Jenderal dan BPSDMI guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
 - Mengawasi pengelolaan anggaran dan keuangan agar berjalan secara transparan dan akuntabel.
2. Audit dan Evaluasi Kinerja
 - Melaksanakan audit internal terhadap program dan kegiatan di satuan kerja vertikal untuk menilai efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
 - Mengevaluasi kinerja SMK, Politeknik, dan Balai Diklat Industri dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pendidikan vokasi industri.
3. Pencegahan dan Deteksi Dini Risiko
 - Mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja terkait.
 - Mengembangkan sistem pengendalian internal guna mengurangi risiko ketidakefektifan program dan penyalahgunaan wewenang.
 - Pendampingan dan Pembinaan
 - Memberikan asistensi dan pendampingan kepada satuan kerja dalam implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan perbaikan tata kelola.
 - Mendorong penerapan budaya integritas dan kinerja berbasis hasil di lingkungan satuan kerja yang diawasi.
4. Monitoring dan Evaluasi Program Strategis
 - Mengawal implementasi kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia industri agar selaras dengan arah pembangunan nasional.
 - Melakukan pemantauan terhadap efektivitas program pendidikan vokasi dan pelatihan industri yang dikelola oleh BPSDMI.

Dengan peran strategis ini, Inspektorat I berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia industri di Indonesia, sejalan dengan visi pembangunan nasional dan reformasi birokrasi.

C. Struktur Organisasi

1. Kelembagaan

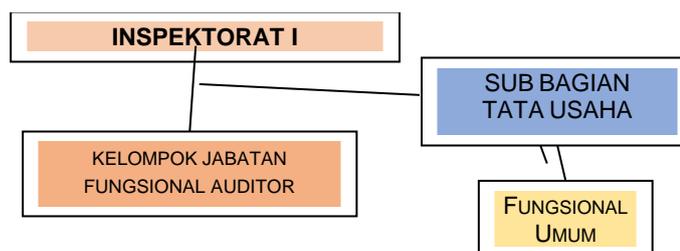
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

- Inspektur
- Subbagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor yang berkompeteren yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat I



2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024 sebanyak 19 orang. Jumlah tersebut terdiri atas pejabat structural 2 orang, auditor sebanyak 14 orang, fungsional umum 1 orang, 1 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 orang pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN). Berdasarkan analisis beban kerja dan penghitungan gugus tugas, jumlah auditor tersebut belum memadai karena belum memenuhi jumlah ideal sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Bagan 2. Peta SDM Inspektorat I

No.	Jumlah SDM APIP	Kondisi saat ini	Jumlah Sesuai Kebutuhan	Ideal
1)	SDM Pengawasan			
a.	Jabatan Struktural	2	2	
b.	Jabatan Fungsional Auditor	15	36	
c.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	
d.	Pegawai Pelaksana Pengawasan bukan Auditor	1	1	
2)	SDM Penunjang (ketatausahaan)			
a.	Jabatan Fungsional tertentu	-	2	
b.	Jabatan Fungsional Umum	1	3	
Jumlah		19	44	

3. Cakupan Tugas

Inspektorat I memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit terdiri dari 2 satker Pusat dan 26 satker vertikal meliputi:

- a. Unit Pusat (2 satker) yaitu:
 - 1) Sekretariat Jenderal;
 - 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- b. Unit Vertikal Politeknik (13 satker), SMK (9 satker) dan BDI (7 satker), yaitu:
 - 1) Politeknik STMI Jakarta;
 - 2) Politeknik STTT Bandung;
 - 3) Politeknik AKA Bogor;
 - 4) Politeknik PTKI Medan;
 - 5) Politeknik ATI Padang;
 - 6) Politeknik ATK Yogyakarta;
 - 7) Politeknik APP Jakarta;
 - 8) Politeknik ATI Makassar;
 - 9) Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - 10) Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
 - 11) Politeknik Industri Logam Morowali;
 - 12) Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal;
 - 13) Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;
 - 14) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Bogor;
 - 15) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Padang;
 - 16) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Makassar;
 - 17) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Banda Aceh;

- 18) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Makassar;
- 19) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Yogyakarta;
- 20) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Bandar Lampung;
- 21) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang;
- 22) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak;
- 23) Balai Diklat Industri Medan;
- 24) Balai Diklat Industri Padang;
- 25) Balai Diklat Industri Jakarta;
- 26) Balai Diklat Industri Yogyakarta;
- 27) Balai Diklat Industri Surabaya;
- 28) Balai Diklat Industri Makassar;
- 29) Balai Diklat Industri Denpasar.

4. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi Inspektorat I

Dalam menjalankan fungsi pengawasan internal dan pembinaan tata kelola terhadap Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), berdasarkan kerangka evaluasi berbasis standar seperti Analisis Risiko Pengawasan (Risk-Based Audit Approach), COSO Internal Control Framework, dan prinsip Good Governance, permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat I dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kompleksitas Pengawasan terhadap Satuan Kerja yang Beragam
 - Inspektorat I bertanggung jawab atas satuan kerja dengan berbagai karakteristik tugas, pola penganggaran, dan sistem tata kelola, sehingga membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda.
 - Sekretariat Jenderal memiliki peran administratif dan regulatif yang menuntut efektivitas dalam pengelolaan keuangan, SDM, serta tata kelola organisasi.
 - BPSDMI beserta satuan kerja vertikalnya bertanggung jawab atas pengembangan SDM industri, yang memerlukan pengawasan terhadap efektivitas program pendidikan dan pelatihan vokasi.
 - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan Balai Diklat Industri (BDI) memiliki kompleksitas pengelolaan keuangan, pengadaan, dan aset yang memerlukan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
2. Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas di Satuan Kerja
 - Masih terdapat tantangan dalam penerapan good governance, transparansi, dan akuntabilitas di beberapa satuan kerja, khususnya dalam aspek berikut:

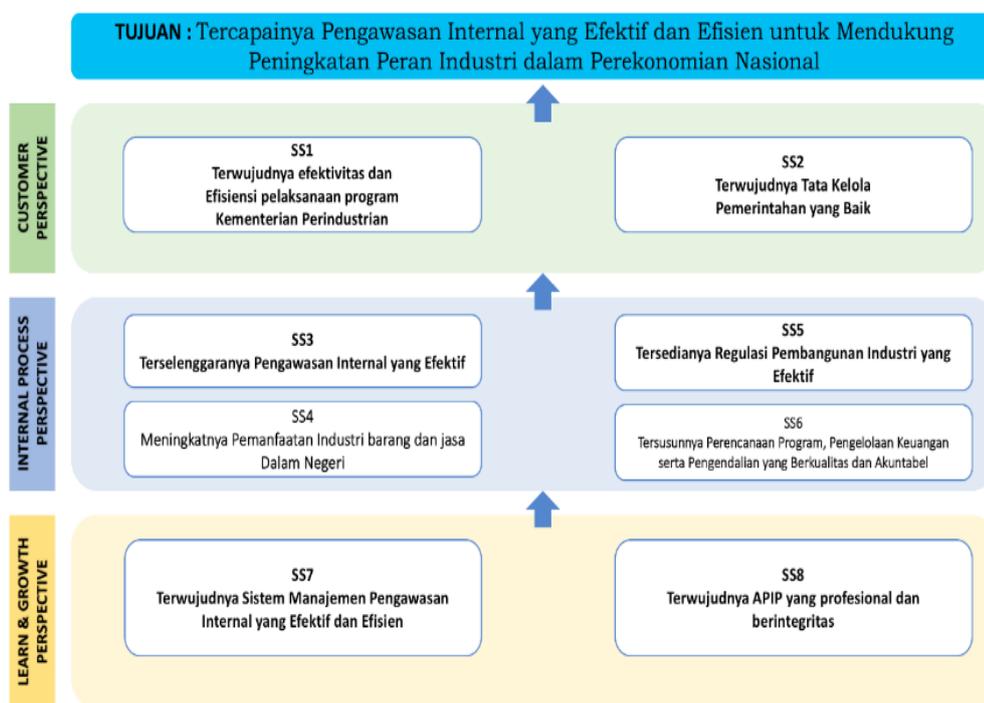
- Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan yang masih memerlukan penguatan sistem pengendalian internal.
 - Pengelolaan aset dan pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakefektifan atau penyimpangan.
 - Efektivitas perencanaan dan realisasi anggaran yang perlu lebih selaras dengan tujuan strategis organisasi.
3. Keterbatasan Sumber Daya Pengawasan
 - Dengan cakupan pengawasan yang luas dan kompleks, jumlah auditor dan tenaga pengawasan yang tersedia masih perlu diperkuat. Tantangan ini berdampak pada:
 - Kapasitas pengawasan yang belum sepenuhnya optimal dalam mengakomodasi semua unit kerja secara komprehensif.
 - Keterbatasan dalam penggunaan teknologi pengawasan berbasis data, yang menghambat efektivitas pemantauan dan deteksi dini risiko.
 4. Risiko dalam Pengelolaan Program Pendidikan dan Pelatihan Industri
 - Sebagai pengawas utama terhadap program pendidikan vokasi dan pelatihan industri, Inspektorat I menghadapi beberapa isu kunci:
 - Sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri yang masih perlu diperbaiki agar lulusan SMK dan Politeknik lebih siap kerja.
 - Ketidakefektifan dalam perencanaan dan implementasi program pendidikan vokasi, yang berisiko terhadap pemanfaatan anggaran yang tidak maksimal.
 5. Peningkatan Integritas dan Budaya Pengawasan di Satuan Kerja
 - Budaya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas di satuan kerja perlu terus diperkuat dengan:
 - Penerapan sistem pengendalian internal yang lebih ketat, untuk mengurangi risiko penyimpangan.
 - Penguatan budaya anti-korupsi dan manajemen risiko, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset publik.
 6. Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dan Digitalisasi Audit
 - Inspektorat I perlu mengoptimalkan pendekatan pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi potensi penyimpangan lebih dini.
 - Penggunaan teknologi audit berbasis data dan digital monitoring, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat I

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu rencana strategis harus memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Rencana Strategis Inspektorat I Tahun 2020-2024 merupakan panduan dalam melaksanakan pengawasan agar berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Inspektorat Jenderal. Adapun peta strategi yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Bagan 3. Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan peta strategi Inspektorat Jenderal, Dengan mengacu pada pendekatan ini, Inspektorat I berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan efektivitas pengawasan internal di lingkungan cakupan tugasnya, guna mendukung pembangunan industri nasional yang kompetitif dan berkelanjutan. Penerapan strategi ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis risiko, sehingga tujuan Kementerian dapat tercapai.

Inspektorat I memiliki tujuan utama mewujudkan pengawasan internal yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional. Dalam mencapai tujuan ini, Inspektorat I mengadopsi Balanced Scorecard (BSC) Approach, yang mencakup tiga perspektif utama:

1. Customer Perspective (Perspektif Stakeholder)
2. Internal Process Perspective (Perspektif Proses Internal)
3. Learn & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan)

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat I adalah sebagai berikut :

Bagan 4. Matrik Indikator Tujuan

Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Mendukung tercapainya tata kelola pemerintah yang baik sehingga meningkatkan peran industri dalam Perekonomian Nasional	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	-	-	-
			(perubahan)	Indeks	-	2,85	2,89	2,92	3

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi yang merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Inspektorat Jenderal, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

Berdasarkan peta strategis pengawasan yang dilakukan Inspektorat I dapat dijabarkan sebagai berikut

Bagan 5. Matrik Renstra Inspektorat I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2023	Target 2023	Target 2024	Cara Pengukuran	
Stakeholders Perspective										
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU (target tetap)	Persen	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	0,8%	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai temuan dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,3% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin
		2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	Persen	91%	91,5%	92% (86,52%)	92,00%	92,20%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti

										dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: $(SR+BSR)/total\ rekomendasi\ (T-1)$, Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2021, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2020
		2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	-	-	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan,dilakukan
					-	-	-(2,85)	2,89	2,92	

										usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan
Internal Process Perspective										
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	Belum ada	70%	80%	80%	85%	Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIPI. Pada tahun 2023, kuesioner akan disebarakan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu

										pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
		2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	76%	77%	78%	79%	80%	<p>Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)*<i>Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan- Penyusunan kertas kerja</i></p>

										pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data- Tahap Pelaporan menggunakan Office
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	3	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	Belum ada	75%	80%	85%	90%	<p>RP_{3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal</p> <p>RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.</p> <p>$TotAP_{3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p> <p>$TotAP_{3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati</p>

											bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.
Learn & Growth Perspective											
		1	Tingkat Pelaksanaan Kesesuaian Pengawasan dengan PKPT	Persen	70%	80%	90%	100%	100%		Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80%	90%	100%	100%	100%		Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki

1. *Stakeholders Prespective*
 - a. Sasaran Strategis pertama (SK1) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian”, dengan indikator kinerja:
 - **Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I (IKU);**
 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I
 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I
 - b. Sasaran Strategis pertama (SK2) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, dengan indikator kinerja:
 - **Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU**
2. *Internal Process Perspective*
 - a. Sasaran Strategis 3 (SK3): ‘Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif dan efisien’, dengan indikator kinerja:
 - Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat I
 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)
 - b. Sasaran Strategis 4 (SK4) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat I (IKU).
3. *Learn & Growth Perspective*

Sasaran Strategis 5 (SK5): Terselenggaranya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien, dengan indikator kinerja:

 - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya;

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

1. Arah Kebijakan
Arah Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian Tahun 2024 adalah **“Tercapainya Target Kementerian Perindustrian Sesuai RIPIN, RPJMN, serta Rencana Strategis”**

2. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Internal 2024 berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

- a. Pengawasan P3DN;
- b. Pengawasan kinerja dan kegiatan beresiko tinggi;
- c. Monitoring dan evaluasi kebijakan sektor industri;
- d. Konsultasi implementasi manajemen resiko; dan
- e. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Perindustrian yang efektif, efisien, ekonomis dan taat peraturan, maka kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan Pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*Assurance*) maupun pemberian jasa konsultasi (*Consulting*). Pengawasan preventif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan. Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2024 yang termasuk ke dalam pengawasan preventif ini adalah:

- a. Kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori)
 - 1) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L);
 - 2) Reviu Laporan Keuangan (LK)/Barang Milik Negara (BMN)/ Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - 3) Pengendalian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
 - 4) Monitoring Penyerapan Anggaran.
- b. Kegiatan Pengawasan Non Madatori
 - 1) Pengawasan Prioritas;
 - 2) Consulting Manajemen Risiko;
 - 3) Kajian Isu Aktual;
 - 4) Pendampingan Pemeriksaan Eksternal.

2. Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran melalui penjaminan mutu (*Assurance*).

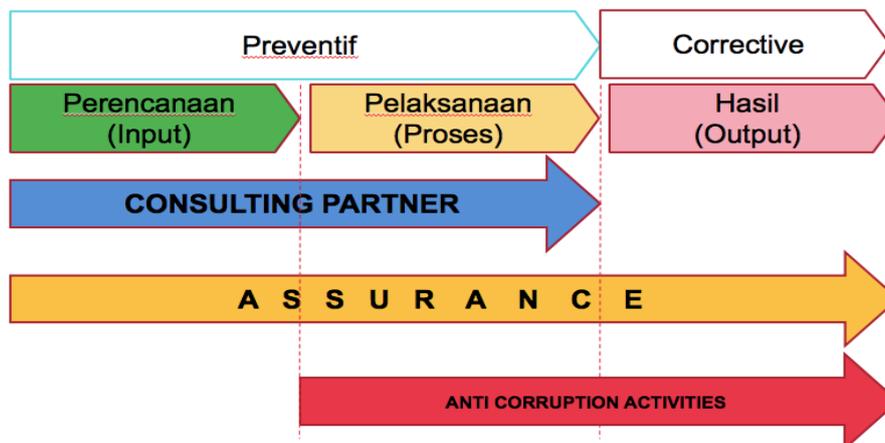
Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2024 yang termasuk ke dalam pengawasan detektif ini adalah:

- a. Kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori):
 - 1) Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan (Zona Integritas, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
 - 2) Penilaian Index Manajemen Risiko (MRI);
 - 3) Pengawasan Kegiatan Konkuren;
- b. Kegiatan Pengawasan Non Madatori
 - 1) Audit Kinerja maupun Audit Khusus;
 - 2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kebijakan bidang perindustrian;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP).

Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian akan dilakukan sejak tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, maupun tahap pelaporan/paska pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pengawasan baik yang bersifat preventif maupun detektif.

Pelaksanaan pengawasan internal pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian sebagai penjamin mutu (Assurance) maupun mitra konsultasi (Consulting Partner). Sedangkan pada tahap pelaporan/paska pelaksanaan kegiatan, pengawasan dilakukan melalui peran APIP sebagai penjamin mutu (Assurance).

Bagan 6. Peran APIP



Berdasarkan rencana Strategis dan Arah kebijakan, maka dalam mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut pada tahun 2024 Inspektorat I menetapkan sasaran sebagai berikut:

Bagan 7. Peta SDM Inspektorat I. Rencana Kinerja Inspektorat I Tahun 2024
TUJUAN

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	SATUAN
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	1	Indeks penerapan manajemen resiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3,00	Indeks

STAKEHOLDER

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
SK.1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I *) IKU	0,08%	Persen
		2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I	100%	Persen
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	92,2%	Persen
SK.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3,00	Indeks

PROSES INTERNAL

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif dan efisien	1	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat I	85%	Persen
		2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	Persen

SK.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I	90%	Persen
------	--	---	--	-----	--------

PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN ORGANISASI

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	
SK.5	Terselenggaranya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	Persen
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Persen

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan internal yang efisien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat I menetapkan kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tema pengawasan (Audit)
 - a) Audit terhadap penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten;
 - b) Audit efektivitas pelaksanaan program prioritas dan industri 4.0;
2. Mandatori
 - a) Audit kinerja
 - b) Reviu LK/BMN dan PIPK
 - c) Reviu RKA dan RK BMN
 - d) Penilaian SAKIP
3. Pengawalan
 - a) Pengawalan Manajemen Resiko
 - b) Pengawalan Kegiatan Beresiko Tinggi

C. Rencana Anggaran Tahun 2024

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I dengan kegiatan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Bagan 8. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2024 (revisi 13)

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	OUTPUT	SATUAN
1 Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1.160.672.000	31	Laporan
2 Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	252.980.000	109	Laporan
3 Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	41.100.000	38	Laporan
4 Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1.062.513.000	18	Laporan
5 Evaluasi Kesiapan Balai Diklat Industri sebagai Center of Excellences pembangunan Tenaga Kerja Industri	253.680.000	1	Laporan
6 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	151.202.000	4	Laporan
7 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	57.853.000	5	Laporan
Total	2.980.000.000	206	Laporan

Sesuai dengan DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024, program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal adalah "Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian". Masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal mempunyai 1 (satu) kegiatan. Adapun kegiatan Inspektorat I adalah "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I" dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 3.450.000.000,- dan pagu akhir Rp.2.980.000.000,-

Bagan 9. Rincian Akun Anggaran Inspektorat I Tahun 2024

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
WA	Program Dukungan Manajemen	3.450.000.000
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	3.450.000.000
1841.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.450.000.000
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	201.202.000
51	Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran	201.202.000
A	Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran	201.202.000
953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	57.853.000

51	<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Inspektorat I</i>	57.853.000
A	Penyusunan Evaluasi Triwulanan Dan Tahunan	57.853.000
965	Layanan Audit Internal	3.190.945.000
51	<i>Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	1.160.672.000
A	Pelaksanaan Audit Kinerja	1.130.832.000
52	<i>Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	257.660.000
A	Pelaksanaan Reviu Pipk Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	32.640.000
B	Pelaksanaan Reviu Lk/bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	120.800.000
C	Pelaksanaan Reviu Rkaki Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	86.160.000
D	Pelaksanaan Reviu Rkbmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	18.060.000
53	<i>Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	41.100.000
A	Pelaksanaan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	41.100.000
54	<i>Konsulting Dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>	1.324.365.000
A	Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	691.246.000
B	Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	269.84.000
C	Sosialisasi/pendampingan Implementasi Spip Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I	242.915.000
D	Efisiensi Kebijakan Perjalan dinas	120.000.000
056	Evaluasi Kesiapan BDI sebagai Center of Excellences	407.148.000
A	Pelaksanaan kesiapan BDI	407.148.000
	TOTAL	3.450.000.000

D. Dokumen Penetapan Kinerja

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun dan didukung oleh anggaran yang tersedia di dalam DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024, maka ditetapkan pengesahan Formulir Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Inspektur I sebagai berikut:

Perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bagan 10. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Capaian Kinerja	
Stakeholders Perspective						
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU (target tetap)	Persen	0,8% (minimasi) Hasil terbaik adalah 0%	$1 - \left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$
		2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	100%	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	Persen	92,2%	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$
		4	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Indeks	3,00	$\left(\frac{realisasi - target}{nilai\ maksimal - target}\right) \times 100\%$
Internal Process Perspective						
2	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	85%	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$
		2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	80%	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$
3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	3	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	90%	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$
Learn & Growth Perspective						
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	100%	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	100%	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dapat dicapai melalui rencana aksi sebagai berikut:

Bagan 11. Rencana Aksi Tahun 2024

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET	SATUAN	KEGIATAN UTAMA	PAGU	TW I	TW II	TW III	TW IV
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	1 Indeks penerapan manajemen resiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3,00	Level	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	3.450.000.000	-	-	-	-

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN UTAMA	PAGU	TW I	TW II	TW III	TW IV
SK.1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	0,8%	Persen	Pelaksanaan Audit Kinerja	1.160.672.000	25%	25%	25%	25%
					Reviu LK/BMN	120.800.000				
					Reviu PIPK	32.640.000				
					Reviu RK-BMN	18.060.000				
					Reviu RKA-K/L	86.160.000				
					Pelaksanaan Kesiapan BDI sebagai COE	407.148.000				
					Evaluasi SAKIP	41.100.000				
					Pembinaan dan Pengawasan	269.844.000				
					Pengawasan Tahun Berjalan	1.324.365.000				

		2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I	100%	Persen	-						-
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti Inspektorat I	92,2%	Persen	-						-
SK.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3,00	Level							

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN UTAMA	PAGU	TW I	TW II	TW III	TW IV
SK.3	Terselenggaranya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat I	85%	Persen	-				-
		2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	Persen					-
SK.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I	90%	Persen					-

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN UTAMA	PAGU	TW I	TW II	TW III	TW IV	
SK.5	Terselenggaranya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	Persen	Rancangan Program Kerja	201.202.000	25%	25%	25%	25%
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Persen	Evaluasi dan Pelaporan	57.853.000	25%	25%	25%	25%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur I kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat I Kementerian Perindustrian pada tahun 2024. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat I dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi atasan kepada pimpinan instansi bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menjadi bentuk komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia.

Tujuan Inspektorat I Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Berdasarkan dokumen RPJMN 2023-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023, pada tanggal 27 Januari 2023 dapat dilihat pada tabel perbandingan indikator kinerja tujuan 1.2 “Indeks Penerapan Manajemen Risiko” atau lebih dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen RPJMN.

Bagan 12. Realisasi Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level (Maturitas)	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-
		Indeks	-	-	-	-	2,85	2,77	2,89	3,445	3	3,688

Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian berperan penting dalam mengukur efektivitas penerapan manajemen risiko di seluruh satuan kerja. Dengan penerapan MRI yang optimal, Kementerian Perindustrian

dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko lebih dini, meningkatkan tata kelola yang baik, serta memastikan keberlanjutan program strategis industri nasional. Melalui pendekatan berbasis risk-based audit, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan kesadaran risiko, MRI diharapkan menjadi alat utama dalam membangun organisasi yang lebih tangguh, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan nasional dalam sektor industri.

Berdasarkan dokumen RPJMN 2023-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023, pada tanggal 27 Januari 2023 dapat dilihat pada tabel perbandingan indikator kinerja tujuan 1.2 “Indeks Penerapan Manajemen Risiko” atau lebih dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen RPJMN. Perbandingannya pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

Bagan 13. Perbandingan Level MRI

Tahun	K/L		
	Pertanian	Perindustrian	Pertanian
2018	3.037	Level 3	3.462
2019	3.112	3.477	3.507
2022	-	2,77	-
2023	-	3,445	-
2024	-	3,688	-

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat I TA 2024 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama:

1. *Stakeholders Perspective*

a. *Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian*

1) **Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I**

Batas ini berfungsi sebagai indikator risiko dan pengendalian internal, memungkinkan deteksi dini terhadap kelemahan sistem yang berpotensi merugikan negara. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kepatuhan, memitigasi risiko, dan memperkuat tata kelola keuangan sesuai standar yang ditetapkan.

Realisasi Belanja APBN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yaitu BPSDMI dan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran dan Hasil Pemeriksaan BPK yang bernilai material berdasarkan LHP BPK Nomor LHP 27.b/LHP/XV/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Bagan 14. Realisasi dan Temuan BPK BPSDMI dan Sekjen

Satuan Kerja	Realisasi Belanja	Temuan BPK
BPSDMI	223.724.551.566,-	644.034.280,-
Sekretariat Jenderal	239.887.651.901,-	-
Total	1.110.294.918.900,-	644.034.280,-

Berdasarkan data tersebut pencapaian Inspektorat I dapat digambarkan sebagai berikut:

PROFIL		IKU	Capaian
Target	ΔM	Total Temuan BPK pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yang bernilai material	0,8%
	ΔR	Total Realisasi Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yang bernilai material	
Realisasi	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$	$\frac{644.034.280,-}{1.110.294.918.900,-} \times 100\%$	0,05%
Kinerja	$1 - \left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$	$1 - \left(\frac{0,05\%}{0,8\%}\right) \times 100\%$	93,75%

Capaian kinerja dalam menekan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan berada pada angka 93,75%, yang menunjukkan bahwa realisasi temuan hanya 0,05% dari total realisasi anggaran, jauh di bawah batas maksimum 0,8%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat I dalam memastikan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, serta efektivitas mekanisme pengendalian internal yang telah diterapkan.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I telah memberikan dampak positif dalam menekan risiko penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini antara lain:

1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang Kuat
2. Implementasi sistem pengendalian berbasis risiko untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.
3. Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pendampingan dan asistensi.
4. Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Satuan Kerja
5. Pemberian rekomendasi perbaikan yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan tata kelola keuangan.

6. Penguatan Proses Mitigasi Risiko dan Tindak Lanjut Temuan
7. Pemantauan secara berkala terhadap implementasi rekomendasi BPK guna memastikan penyelesaian yang efektif.
8. Penguatan koordinasi antara Inspektorat I, satuan kerja, dan pihak terkait dalam merespons potensi permasalahan keuangan.
9. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pemantauan keuangan guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Meskipun capaian kinerja saat ini sudah menunjukkan tren positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan, antara lain:

1. **Dinamika Perubahan Regulasi**
Regulasi dalam pengelolaan keuangan negara terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Oleh karena itu, Inspektorat I perlu terus memperbarui pemahaman dan memberikan asistensi kepada satuan kerja agar selalu selaras dengan ketentuan yang berlaku.
2. **Optimalisasi Teknologi dalam Pengawasan**
Pemanfaatan sistem berbasis teknologi dalam pemantauan dan analisis keuangan dapat semakin meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat identifikasi potensi penyimpangan.
3. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**
Penguatan kompetensi auditor internal dan pengelola anggaran di satuan kerja menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Bagan 15. Pencapaian 5 tahun terakhir

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Batas</i>	0,003%	0,003%	0,003%	0,085%	0,05%
<i>Capaian</i>	91,31%	91,31%	91,31%	95,21%	93,75%

Capaian 93,75% dalam menekan jumlah temuan BPK menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat I telah berjalan efektif dan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan.

Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan pengendalian internal, optimalisasi mitigasi risiko, serta peningkatan kepatuhan satuan kerja dalam mengelola anggaran.

Dengan strategi yang tepat, diharapkan jumlah temuan BPK dapat semakin diminimalkan, sehingga tata kelola keuangan negara semakin transparan, efisien, dan akuntabel.

2) **Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti**

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah pengaduan Masyarakat terkait satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I yang telah ditindaklanjuti.

Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan adalah laporan yang memerlukan tindak lanjut karena terkait dengan dugaan pelanggaran, penyimpangan, atau ketidaksesuaian dalam tata kelola satuan kerja. Inspektorat I memastikan setiap pengaduan yang memenuhi kriteria ditindaklanjuti secara sistematis melalui verifikasi, analisis, dan koordinasi dengan pihak terkait. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan dalam rangka mencegah dan menindaklanjuti potensi pelanggaran.

Melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id.) diperoleh pengaduan masyarakat sebanyak 22 (dua puluh dua) laporan pengaduan dengan rincian:

Bagan 16. Pengaduan Masyarakat

Unit Kerja	Jenis Pengaduan				
	Aspirasi	Berkadar Pengawasan	Tidak Berkadar Pengawasan	Permintaan Informasi	Whistle blowing
Sekretariat Jenderal	7	-	6	5	-
BPSDMI	-	-	2	1	-
Total	7	-	8	6	-

Unit Kerja	Status			
	BT	B	P	S
Sekretariat Jenderal	-	-	1	17
BPSDMI	-	-	-	3
Total	-	-	1	20

*) B belum ditindak lanjuti *) P Proses tindak lanjut *) S Selesai *) BT Belum Terverifikasi

Berdasarkan data tersebut pencapaian Inspektorat I dapat digambarkan sebagai berikut:

	PROFIL	IK	Capaian
TARGET	ΔAdt	Total Aduan pada cakupan tugas Inspektorat I yang ditindaklanjuti	100%
	ΔAt	Total aduan pada cakupan tugas Inspektorat I yang masuk melalui SP4N Lapor	
REALISASI	$\frac{\Delta Adt}{\Delta At} \times 100\%$	$\frac{21}{21} \times 100\%$	100%
KINERJA	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$	$\left(\frac{100\%}{100\%}\right) \times 100\%$	100%

Hasil ini menunjukkan bahwa setiap aduan yang masuk telah mendapatkan respons dan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku, mencerminkan efektivitas dan komitmen Inspektorat I dalam menangani laporan masyarakat dengan cepat dan tepat. Pencapaian 100% dalam penyelesaian pengaduan masyarakat mencerminkan beberapa faktor keberhasilan, antara lain

1. Terdapat sistem yang responsif dalam penanganan pengaduan.
Inspektorat I bersama dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menerapkan mekanisme yang sistematis dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
2. Proses koordinasi dengan unit kerja terkait dilakukan secara efektif untuk mempercepat penyelesaian aduan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tindak Lanjut Pengaduan
Setiap pengaduan diproses dengan prinsip transparansi, memastikan bahwa laporan masyarakat mendapatkan respons yang jelas dan terukur.

Meskipun capaian kinerja dalam penyelesaian pengaduan masyarakat telah mencapai 100%, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk menjaga efektivitas sistem pengaduan, di antaranya dengan meningkatkan kualitas tindak lanjut dengan memastikan bahwa penyelesaiannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola di unit binaan serta menjalin koordinasi yang lebih erat antara Inspektorat I, satuan kerja, dan instansi terkait

akan memastikan bahwa setiap pengaduan mendapatkan penyelesaian yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Bagan 17. 5 tahun terakhir

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Aduan Tertindak Lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian 100% dalam penyelesaian pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa Inspektorat I telah menjalankan perannya dengan optimal dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Keberhasilan ini perlu terus dipertahankan dengan memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pengaduan. Dengan strategi yang tepat, Inspektorat I dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan terhadap unit binaannya.

3) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I;

Inspektorat I memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan internal ditindaklanjuti secara efektif oleh satuan kerja terkait. Tindak lanjut ini mencakup perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengendalian internal guna meminimalkan risiko dan meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan PKPT Inspektorat I pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Tahun Anggaran 2023 dalam 90 (sembilan puluh) hari s/d Triwulan IV dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Bagan 18. Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat 1

a) Tindak Lanjut Internal Inspektorat I

Unit	Jumlah Temuan	Status Rekomendasi			
		SR	BSR	B	TPTD
Inspektorat I	5	-	6	-	-
Total	5		6		

b) Unit Pusat

Unit	Jumlah Temuan	Status Rekomendasi			
		SR	BSR	B	TPTD
Sekretariat Jendral	25	25	0	21	0
Biro Keuangan	6	10	0	0	0
Biro Perencanaan	3	0	0	3	0
Biro OSDM	4	10	0	0	0
Biro Hukum	3	0	0	8	0
Biro Umum	5	0	0	8	0
Biro Humas	4	5	0	2	0
BPSDMI	45	53	3	10	0
PPVI Konstruksi	4	7	0	0	0
Pusbindiklat SDMA	10	12	0	0	0
Set. BPSDMI	12	14	2	1	0
Pusdiklat SDMI	10	3	1	9	0
PPVI	9	17	0	0	0
Total	70	78	3	31	0

c) BDI

Unit	Jumlah Temuan	Status Rekomendasi			
		SR	BSR	B	TPTD
BDI Denpasar	5	12	0	0	0
BDI DKI Jakarta	5	6	0	0	0
BDI Makassar	5	11	0	0	0
BDI Medan	5	7	0	0	0
BDI Padang	7	9	0	0	0
BDI Surabaya	7	12	0	0	0
BDI Yogyakarta	5	9	0	0	0
Total	39	66	0	0	0

d) Politeknik

Unit	Jumlah Temuan	Status Rekomendasi			
		SR	BSR	B	TPTD
STTT Bandung	9	19	0	0	0
AKITP Surakarta Jateng	6	15	0	0	0
AKIM Bantaeng	8	16	0	0	0
PTKI Medan	9	0	18	0	0
ATK Yogyakarta	8	17	0	0	0
Politeknik ATI Padang	7	13	0	0	0
Politeknik ATI Makassar	8	12	0	0	0
Politeknik APP Jakarta	10	17	0	0	0
Politeknik AKA Bogor	6	14	0	0	0
Politeknik STMI Jakarta	8	15	0	0	0
Politeknik IFPK Kendal	9	20	0	0	0
Politeknik Morowali	8	24	0	0	0
Politeknik Petrokimia Cilegon	8	16	0	0	0
SMTI Makassar	7	5	3	6	0
SMTI Yogyakarta	6	10	0	0	0
SMTI Lampung	9	17	0	0	0
SMTI Pontianak	6	14	1	0	0

SMTI Padang	8	14	0	0	0
SMTI Aceh	11	20	0	0	0
SMAK Padang	7	10	0	0	0
SMAK Makassar	7	16	0	0	0
SMAK Bogor	8	18	1	1	0
Total	173	322	23	7	0

Berdasarkan data diatas dapat di rangkum sebagai berikut:

Unit	Jumlah Temuan	Status Rekomendasi			
		SR	BSR	B	TPTD
Internal	5	0	6	-	0
Unit Pusat	70	78	3	31	0
BDI	39	66	0	0	0
Politeknik	173	322	23	7	0
Total	287	466	33	38	0

Melalui pemantauan berkala, Inspektorat I memastikan bahwa setiap rekomendasi diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tata kelola yang lebih transparan dan efisien. Berdasarkan aktifitas-aktifitas yang dilakukan capaian sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut

PROFIL		IKU	Capaian
TARGET	ΔM	Total Rekomendasi yang ditindak lanjuti Cakupan Tugas Inspektorat I dengan status SR, BSR	92,2%
	ΔR	Total Rekomendasi cakupan Tugas Inspektorat I	
REALISASI	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$	$\frac{499}{536} \times 100\%$	93,09%
KINERJA	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$	$\left(\frac{93,09\%}{92,2\%}\right) \times 100\%$	100,96%

Pada periode evaluasi ini, Inspektorat I berhasil mencapai 100% dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal. Capaian ini menunjukkan efektivitas mekanisme pengawasan dan komitmen satuan kerja dalam melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan. Penyelesaian rekomendasi secara penuh mencerminkan kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance) serta memperkuat sistem pengendalian

internal guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

Keberhasilan ini juga didukung oleh koordinasi yang baik antara Inspektorat I dan satuan kerja terkait, memastikan bahwa setiap rekomendasi tidak hanya ditindaklanjuti secara administratif tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam perbaikan sistem dan prosedur. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala yang dilakukan membantu memastikan efektivitas tindak lanjut dan mencegah permasalahan serupa muncul kembali.

Bagan 19. Pencapaian 5 tahun terakhir

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi Tertindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Meskipun capaian telah mencapai 100%, Inspektorat I tetap perlu melakukan langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pengawasan, seperti penerapan sistem pemantauan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan, serta optimalisasi metode audit berbasis risiko. Dengan pendekatan ini, Inspektorat I dapat memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar berdampak pada perbaikan berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas tata kelola satuan kerja.

b. *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*

1) Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5.

Capaian sasaran ini dapat dilihat melalui hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP dengan hasil dapat digambarkan sebagai berikut

	PROFIL	IKU	Capaian
Target	Hasil Penilaian dan Evaluasi dari BPKP Terhadap Kementerian Perindustrian dengan nilai tertinggi 4,50. Nilai dari BPKP adalah 3,688		3,00
Realisasi	$\left(\frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{nilai maksimal} - \text{target}}\right) \times 100\%$	$\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}}\right) \times 100\%$	3,688
Kinerja	$\left(\frac{3,688}{3,00}\right) \times 100\%$	Analisis Capaian Berdasarkan Perbandingan dengan Target	122,93%
	$\left(\frac{3,688 - 3,00}{4,50 - 3,00}\right) \times 100\%$	Analisis Capaian Berdasarkan Rentang Target ke Maksimum	45,87%

Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian menunjukkan realisasi 3,688 dari target 3,00, dengan nilai maksimum yang dapat dicapai sebesar 4,50 atau lebih. Untuk mengukur tingkat pencapaian, digunakan dua pendekatan perhitungan guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.

Dari dua pendekatan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko sudah berada di atas target, yang mencerminkan efektivitas strategi yang telah diterapkan. Namun, masih ada potensi peningkatan menuju nilai maksimal, yang menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang dapat lebih diperkuat.

Capaian ini menandakan bahwa pengelolaan risiko di Kementerian Perindustrian telah mengalami perkembangan yang baik, dengan beberapa faktor pendukung, seperti:

- Penguatan kebijakan dan regulasi manajemen risiko yang telah diterapkan dengan lebih baik.
- Peningkatan kesadaran organisasi terhadap pengelolaan risiko, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional harian.
- Koordinasi yang lebih baik antar unit kerja dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko.

Namun, tantangan masih perlu diatasi untuk mencapai indeks maksimal, di antaranya:

- (1) Optimalisasi sistem pemantauan risiko berbasis teknologi untuk meningkatkan respons yang lebih cepat terhadap potensi risiko.

- (2) Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan risiko, sehingga pemahaman dan penerapan lebih merata di seluruh unit kerja.
- (3) Evaluasi kebijakan dan sistem mitigasi risiko secara berkala, agar strategi yang digunakan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru.

Bagan 20. Pencapaian 5 tahun terakhir

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks MRI	Belum ada indikator	2,77	2,85	3,445	3,688
Capaian	-	114,11%	118,25%	120,22%	122,93%

Secara keseluruhan, capaian Indeks MRI sebesar 122,93% terhadap target menunjukkan progres yang baik dalam implementasi manajemen risiko, sementara capaian 45,87% terhadap nilai maksimal mengindikasikan adanya peluang perbaikan menuju standar tertinggi. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, Kementerian Perindustrian perlu mengembangkan sistem pemantauan yang lebih canggih, meningkatkan keterlibatan SDM, serta mengintegrasikan strategi manajemen risiko dalam proses bisnis utama. Dengan pendekatan ini, pencapaian pada periode berikutnya dapat semakin mendekati skor maksimal 4,50, menjadikan sistem manajemen risiko lebih matang, efektif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

2. Internal Process Perspective

a. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

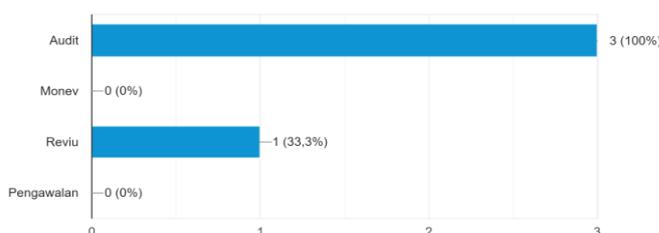
1) Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat I

Tingkat kepuasan pelanggan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas dan kualitas layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat I kepada unit kerja dalam cakupan tugasnya. Evaluasi ini dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan yang diukur menggunakan kuesioner, dengan responden berasal dari pegawai pada unit kerja yang telah memperoleh layanan Inspektorat I.

Indikator ini dihitung berdasarkan survei kepuasan pelanggan kepada para stakeholders Inspektorat I. Berdasarkan survei dengan menggunakan kuesioner, terdapat responden dari pegawai pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat I yang memberikan nilai.

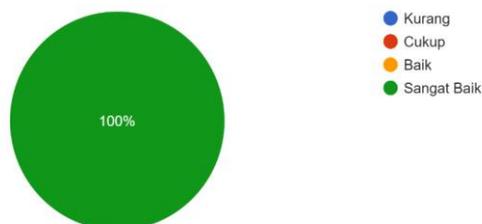
PROFIL		IK	Capaian
TARGET	ΔM	Total Survey	85%
	ΔR	Total Responden	
REALISASI	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$	$\frac{100}{100} \times 100\%$	100%
KINERJA	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$	$\left(\frac{100\%}{85\%}\right) \times 100\%$	117,64%

Layanan Pengawasan yang telah diperoleh selama tahun 2024
3 jawaban



Dengan Perhitungan s/d akhir desember adalah sebagai berikut

Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
3 jawaban



Berdasarkan survei hasil penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat I adalah 100%.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Inspektorat I perlu memperkuat sosialisasi terkait layanan Monev dan Pengawasan, agar unit kerja lebih memahami manfaat serta prosedur aksesnya. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kepuasan pelanggan tetap diperlukan guna mempertahankan standar layanan yang telah tinggi sekaligus mengidentifikasi potensi perbaikan ke depan.

Bagan 21. Pencapaian 5 tahun terakhir

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan	100%	90%	97,2%	84,27%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	117,64%

Dengan terus mengembangkan sistem layanan berbasis teknologi, memperkuat komunikasi dengan stakeholder, serta meningkatkan efisiensi dalam pengawasan, diharapkan Inspektorat I dapat terus memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan semakin meningkatkan kepuasan unit kerja di masa mendatang.

2) **Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer**

Penggunaan TABK atau CAATs akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas auditor dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki oleh komputer. Untuk itu mengkombinasikan pemahaman mengenai pentingnya keahlian audit dengan pengetahuan sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam proses audit.

Aplikasi yang dipergunakan antara lain aplikasi MS Excel dan aplikasi penganggaran atau evaluasi kinerja pada intranet Kemenperin. Seluruh proses audit dan reuiu telah memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, meskipun masih terbatas pada pengumpulan dan validasi data.

Capaian sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut

PROFIL		IK	Capaian
TARGET	ΔM	Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan- Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data- Tahap Pelaporan menggunakan Office	80%
	ΔR	Total Realisasi Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yang bernilai material	
REALISASI	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$	$\frac{31}{31} \times 100\%$	100%
KINERJA	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$	$\left(\frac{100\%}{80\%}\right) \times 100\%$	125%

Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dalam kegiatan audit di Inspektorat I menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan seluruh 31 kegiatan audit telah menerapkan TABK. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%, dengan realisasi mencapai 125% terhadap target.

Keberhasilan ini mencerminkan adopsi teknologi audit yang optimal, didukung oleh peningkatan kapasitas auditor dalam penggunaan perangkat lunak audit, integrasi sistem digital dalam pengawasan, serta komitmen Inspektorat I dalam menerapkan audit berbasis data.

Meskipun capaian sudah optimal, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan keberhasilan ini, seperti pemeliharaan infrastruktur IT, pengembangan kapasitas auditor dalam teknik audit lanjutan, serta optimalisasi integrasi data antar sistem pengawasan.

Bagan 22. Pencapaian 5 tahun terakhir

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Penerapan TABK</i>	100%	91%	100%	100%	100%
<i>Capaian</i>	100%	100%	100%	100%	125%

Dengan strategi ini, Inspektorat I dapat terus meningkatkan efektivitas audit berbasis teknologi, memastikan pengawasan yang lebih akurat, serta memperkuat tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

3) **Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri**

Dalam rangka mendukung kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta mendorong kemandirian industri nasional, diimplementasikan pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian perindustrian mengukur sejauh mana anggaran pengadaan barang dan jasa telah dialokasikan untuk produk dalam negeri sesuai dengan prinsip Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemilihan indikator ini didasarkan pada pentingnya peran instansi pemerintah dalam memperkuat industri dalam negeri melalui belanja yang berbasis produk lokal, sehingga dapat memberikan

dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung kebijakan substitusi impor dalam pengadaan barang dan jasa.

Total Pagu Anggaran P3DN dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I dihitung berdasarkan akun yang telah disepakati bersama. Akun yang digunakan dalam perhitungan ini mencakup berbagai jenis belanja operasional dan modal, di antaranya: 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111.

Perhitungan capaian dilakukan dengan membandingkan total realisasi anggaran terhadap pagu yang telah dialokasikan, guna mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan P3DN telah berjalan.

Bagan 23. Data Realisasi Inspektorat 1

MAK	Deskripsi	Pagu	Realisasi
521211	Belanja Bahan	277.978.000	277.978.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24.000.000	24.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.682.782.000	2.682.782.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	417.240.000	417.240.000
TOTAL		3.450.000.000	3.450.000.000

*)tidak memperhitungkan blokir anggaran

Berdasarkan data tersebut capaian Inspektorat I dapat digambarkan sebagai berikut

PROFIL		IKU	Capaian
Target	ΔM	Total Realisasi	90%
	ΔR	Total Pagu Anggaran P3DN	
Realisasi	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$	$\frac{3,450M}{3,450M} \times 100\%$	100%
Kinerja	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$	$\left(\frac{100\%}{90\%}\right) \times 100\%$	111,11%

Dalam evaluasi Tahun 2024, hasil perhitungan menunjukkan bahwa realisasi anggaran P3DN telah mencapai 100% dari total pagu yang tersedia, menandakan bahwa seluruh alokasi anggaran telah digunakan sepenuhnya untuk mendukung penggunaan produk dalam

negeri. Namun, perlu dicatat bahwa pengukuran ini masih dilakukan secara agregat terhadap akun belanja tanpa mempertimbangkan bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) per produk, sebagaimana yang dianjurkan dalam kebijakan P3DN Nasional.

Bagan 24. Pencapaian 5 tahun terakhir

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase PDN	-	100%	100%	100%	100%
Capaian	-	100%	100%	100%	111,11%

Keberhasilan pencapaian 100% realisasi dalam P3DN menunjukkan komitmen Inspektorat I dalam mengoptimalkan belanja produk dalam negeri sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk meningkatkan akurasi pengukuran ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih detail, seperti identifikasi tingkat TKDN pada setiap produk, serta sistem pemantauan digital guna memastikan bahwa capaian yang dilaporkan benar-benar mendukung pertumbuhan industri dalam negeri secara maksimal. Dengan langkah-langkah ini, Inspektorat I dapat terus memperkuat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta mendukung program P3DN sebagai bagian dari strategi kemandirian industri nasional

3. *Learn & Growth Perspective*

a. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

1) **Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT**

Dalam rangka memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan, Inspektorat I memilih Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai indikator kinerja utama. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan pengawasan yang telah dilakukan selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam PKPT guna memastikan bahwa seluruh kegiatan audit, reuiu, monitoring, serta evaluasi dilakukan sesuai dengan prioritas strategis dan kebutuhan organisasi. Dengan tingkat kesesuaian yang tinggi, Inspektorat I dapat menjamin bahwa pengawasan yang dilakukan memberikan

manfaat optimal bagi peningkatan tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan kerja.

Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dihitung dengan membandingkan jumlah kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam PKPT

Sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan PKPT Tahun 2024 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I dapat dilihat sebagai berikut:

Bagan 25. PKPT Penugasan Inspektorat I

No.	Kegiatan	Nama Penugasan	HP	Gugus	Realisasi
1.	Audit	Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN	225 Hari	3 GT	225 HP
2.	Monitoring	Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit	5 Hari	3 GT	5 HP
		Monev Kesiapan BDI Sebagai CoE	21 Hari	1 GT	21 HP
		Evaluasi SAKIP	21 Hari	3 GT	21 HP
3	Reviu	Reviu LK/BMN Reviu RKA-K/L	10 hari	2 GT	10 HP
4	Pengawasan Lainnya	Asistensi, Konsultasi	-	-	-

*) Rata-rata 1 GT 1:3:6

Berdasarkan data tersebut capaian Inspektorat I dapat digambarkan sebagai berikut

PROFIL		IKU	Capaian
Target	ΔM	Total Penugasan tahun 2024	100%
	ΔR	Total Program Kerja Pengawasan Tahunan 2024	
Realisasi	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$	$\frac{261}{261} \times 100\%$	100%
Kinerja	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$	$\left(\frac{100\%}{100\%}\right) \times 100\%$	100%

Dalam evaluasi Tahun 2024, hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dalam PKPT, sehingga capaian mencapai 100%. Capaian ini

menunjukkan bahwa Inspektorat I telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan program yang telah direncanakan, mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan eksekusi pengawasan.

Namun, meskipun capaian telah mencapai 100%, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan tidak hanya sesuai secara kuantitatif tetapi juga memberikan dampak yang maksimal dalam mendukung tata kelola organisasi. Beberapa tantangan yang masih perlu diperhatikan antara lain fleksibilitas dalam menyesuaikan pengawasan terhadap dinamika perubahan kebijakan, kesiapan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan, serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Keberhasilan pencapaian 100% kesesuaian dengan PKPT menunjukkan bahwa Inspektorat I telah menjalankan pengawasan sesuai rencana, namun untuk peningkatan lebih lanjut, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas dan dampak pengawasan.

Bagan 26. Pencapaian 5 tahun terakhir

<i>Tahun</i>	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Kesesuaian PKPT</i>	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Capaian</i>	100%	100%	100%	100%	100%

Strategi yang dapat diterapkan meliputi penyesuaian PKPT yang lebih fleksibel terhadap kebutuhan organisasi, pemanfaatan data analitik dalam perencanaan pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait guna memastikan bahwa pengawasan tidak hanya berjalan sesuai rencana tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi tata kelola pemerintahan.

2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan, Inspektorat I memilih Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai dengan Perannya sebagai indikator kinerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pengawasan telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan peran yang seharusnya.

Pemilihan indikator ini didasarkan pada pentingnya penugasan SDM yang tepat guna memastikan pengawasan berjalan efektif, efisien, serta memberikan dampak maksimal terhadap tata kelola dan akuntabilitas organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian pemeranan dan kompetensi dalam jenjang jabatan menjadi ukuran dalam menentukan pemilihan Tim Pengawasan.

Berikut data pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT Tahun 2024

Bagan 27. Data Pelaksanaan PKPT

Kategori SDM Pengawasan	Total SDM Tersedia	Peran	Penugasan	Persentase
Inspektur	1	PenanggungJawab	Seluruh Penugasan Pengawasan	100%
Auditor Utama	1	Pengendali Mutu	Seluruh Penugasan Pengawasan	100%
Auditor Madya	3	Pengendali Teknis	Audit, Reviu, Monitoring, Pengawasan Lainnya	100%
Auditor Muda	6	Ketua Tim	Audit, Reviu, Monitoring, Pengawasan Lainnya	100%
Auditor Pertama	6	Anggota	Audit, Reviu, Monitoring, Pengawasan Lainnya	100%
Administrator dan Pendukung	3	Administrasi	Audit, Pengawasan Lainnya	100%
Total	20			100%

Berdasarkan data tersebut capaian Inspektorat I dapat digambarkan sebagai berikut

PROFIL		IK	Capaian
Target	ΔM	Total Penugasan sesuai dengan peran	
	ΔR	Total Penugasan Pengawasan	
Realisasi	$\frac{\Delta M}{\Delta R} \times 100\%$	$\frac{100\%}{100\%} \times 100\%$	100%
Kinerja	$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\%$	$\left(\frac{100\%}{100\%}\right) \times 100\%$	100%

Keberhasilan dalam kesesuaian penugasan SDM pengawasan tercermin dari terealisasinya seluruh tugas pengawasan sesuai dengan jumlah hari kerja yang dialokasikan, yang mencerminkan perencanaan SDM yang baik dan efektif. Beberapa kategori pegawai telah mencapai 100% kesesuaian, seperti Auditor Ahli Utama, Auditor Ahli Madya, dan Administrator & Pendukung, menandakan bahwa seluruh pegawai dalam kategori tersebut telah ditugaskan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Selain itu, mayoritas kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dengan realisasi jumlah hari penugasan (HP) yang mencapai 100% dari rencana, menunjukkan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan tugas pengawasan.

Tantangan lainnya adalah belum adanya data pencatatan untuk kategori "Pengawasan Lainnya" seperti Asistensi dan Konsultasi, sehingga diperlukan mekanisme pencatatan yang lebih jelas agar seluruh kegiatan pengawasan dapat diukur dan dievaluasi secara lebih komprehensif.

Bagan 28. Pencapaian 5 tahun terakhir

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Kesesuaian PKPT</i>	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Capaian</i>	100%	100%	100%	100%	100%

Perbaikan dalam sistem pencatatan, optimalisasi pemetaan SDM, serta program peningkatan kompetensi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan guna mencapai kesesuaian penugasan SDM pengawasan yang lebih optimal.

Berdasarkan matrik diatas dapat diringkas capaian Inspektorat I dapat diringkas sebagai berikut

N0	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	0,8%	0,05%	Tercapai 93,75%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	100%	100%	Tercapai 100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	92.2%	93.09%	Tercapai 100.96%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	IKU	3,00	3,688	Tercapai 122,93%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	85%	100%	Tercapai 100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	80%	100%	Tercapai 125%
		Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I	IKU	90%	100%	Tercapai 111,11%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	100%	100%	tercapai 100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	100%	100%	Tercapai 100%

Bagan 29. Realisasi Sasaran Strategis

Ringkasan Pencapaian Indikator Kinerja sampai dengan Tahun Berjalan dan Target Jangka Menengah
 Bagan 30. Realisasi Sasaran Strategis

No	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Jangka Menengah									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	1,50%	0,003 %	1,40%	0,003%	1,30%	0,003%	1,20%	0,0869%	0,80%	0,05%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti Inspektorat I	91%	93%	91,50 %	88%	92%	71%	92%	98.73%	92,20%	100%
		Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	2,77 *)	2,89	3,445	3,00	3,445
2.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	100%	75%	-	-	-	-	-	-	-
		Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat I	-	-	75%	100% *)	80%	100%	80%	100%	85%	100%

	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	-	77%	-	78%	-	79%	100%	80%	80%	
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I	-	-	75%	100%	80%	100%	85%	100%	90%	100%
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien\	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	100%	80%	100%	90%	100%	100%	89,56%	100%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Rencana Aksi 2024
Bagan 31. Capaian Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	0,8%	Belum dapat diukur	Reviu buka blokir tingkat eselon I: BPSDMI dan Sekjen	Belum dapat diukur	Reviu L/K dan BMN Semester I, pelaksanaan Triwulan III	100%	Kementerian Perindustrian dan telah diperoleh informasi terkait hasil pemeriksaan adalah 0,089%	100%	Seluruh laporan Kementerian Perindustrian dan telah diperoleh informasi terkait hasil pemeriksaan adalah 0,05% pada cakupan Inspektorat I
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti Inspektorat I	8%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	80%	Tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan, pelaksanaan berkoordinasi dengan Set.Itjen,	100%	Pelaksanaan berkoordinasi dengan Bagian TL Set.Itjen dengan sampling sebanyak 6 Satker
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi	Belum dapat diukur	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi	Belum dapat diukur	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi	100%	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU	91,5%	Belum dapat diukur	-	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	60%	Consulting dan Pengawasan	7 Rekomendasi	Laporan hasil Monev yang berisi rekomendasi telah disusun
		Persentase jumlah rekomendasi hasil revidu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti*)IKU	80%	80%	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	100%	Reviu RKAKL Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian telah kan oleh satuan kerja telah disampaikan.	100%	Reviu RKAKL Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan pada tanggal 23 - 25 September 2019, seluruh perbaikan telah disampaikan oleh satker.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	14%	Reviu buka blokir BPSDMI (Pusat) dan Audit 19 Satker	30%	Pada Triwulan II Audit telah dilakukan pada seluruh Satker: 30 Satker. sedangkan Reviu dan Monev akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Kegiatan ini sesuai dengan jadwal PKPT.	90%	Sampai Triwulan III Audit telah dilaksanakan seluruhnya pada 27 Satker, BPSDMI akan dilaksanakan pada triwulan IV. Reviu LK/BMN pada 28 Satker sebanyak 2 kali. Monev sedang dalam proses pelaksanaan.	100%	Sampai Triwulan IV telah dilakukan Reviu LK/BMN pada 28 Satker sebanyak 2 kali seluruhnya telah sesuai dengan PKPT. Audit dilakukan pada 28 Satker, kegiatan ini sesuai dengan jadwal PKPT.
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	85%	Belum dapat diukur	Satker yang diaudit telah memenuhi standar mutu pengawasan	100%	Dari 30 Satker Binaan yang diaudit pada Triwulan I dan II, seluruhnya telah memenuhi standar mutu pengawasan	100%	Dari 28 Satker Binaan yang diaudit pada Triwulan I dan II, seluruhnya telah memenuhi standar mutu pengawasan	100%	Dari 28 Satker Binaan hingga Triwulan IV, seluruhnya telah emenuhi standar mutu pengawasan
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri	50%	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	40%	Koordinasi dengan Set.Itjen	100%	Koordinasi dengan Set.Itjen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan								
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I										
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	50%	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	40%	Koordinasi dengan Set.Itjen	100%	Koordinasi dengan Set.Itjen	
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	50%	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	40%	Koordinasi dengan Set.Itjen	100%	Koordinasi dengan Set.Itjen	

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Inspektorat I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.450.000.000,-. Namun Sepanjang tahun 2024, realisasi telah mencapai Rp.2.979.999.973,- atau 86,38% dan apabila mengesampingkan pagu blokir sebesar Rp.470.000.000.- capaian realisasi sampai dengan ahir adalah 99,99%.

Apabila dilihat dari pencapaian output kinerja dan anggaran yang telah digunakan selama tahun 2024 adalah:

Bagan 32. Capaian Output Kinerja 2024

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	KET
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	206 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	Dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat I
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2023 Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2024 Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2024 Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW III tahun 2024 Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2023/2024
965	Layanan Audit Internal	200 Laporan	LHPI pada Satuan kerja BPSDMI LHPI pada Setjen Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Satuan kerja BPSDMI (28 Laporan) Laporan PIPK TA 2023 dan Semester I TA 2022 pada cakupan Inspektorat I (6 Laporan) Reviu RKA-KL TA 2024 BPSDMI Reviu RKA-KL TA 2024 Setjen Laporan Evaluasi SAKIP Satuan kerja BPSDMI Laporan Evaluasi SAKIP pada Eselon II BPSDMI dan Setjen Laporan/ Nota Dinas Pengawasan Kegiatan beresiko Tinggi

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian sepanjang Tahun 2024 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan, dapat dilihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya terdapat efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar 0,1% dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Bagan 33. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2023 dan 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total			Realisasi Anggaran 2023 (%)	Efisiensi Anggaran 2024 (%)
		2023	2024	Perbedaan	2023	2024	Perbedaan		
1	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1.190.370.000	1.160.672.000	-29.698.000	1.190.370.000	1.160.672.000	0,1	99,996	5
2	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	258.448.000	257.660.000	-788.000	258.448.000	257.660.000	0,1	100,00	5
3	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	76.600.000	41.100.000	-35.500.000	76.600.000	41.100.000	0,1	100,00	5
4	Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	508.430.000	1.324.365.000	815.935.000	508.430.000	1.324.365.000	0,1	99,999	5
5	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	22.748.000	201.202.000	178.454.000	22.748.000	201.202.000	0,1	100,00	5
6.	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	43.404.000	57.853.000	14.449.000	43.404.000	57.853.000	0,1	100,00	5
7.	Evaluasi Kesiapan BDI sebagai COE		407.148.000	407.148.000		407.148.000			
	Total	2.100.000.000	3.450.000.000	1.350.00.000	2.100.000.000	3.450.000.000	1	99,997	30

Jumlah Target Output kegiatan Inspektorat I pada tahun 2024 adalah 206 dokumen. Hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2024, seluruh output kegiatan telah tercapai sebagaimana terlampir pada bagan 17 dan bagan 20. Jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp2.979.999.973,- dengan efisiensi anggaran sebesar Rp470.000.000,- atau sebesar 13,62% dari pagu anggaran Rp3.450.000.000,-. Efisiensi tersebut terdiri dari self blocking terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya.

Bagan 34. Matriks efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan perjanjian kinerja dapat dilihat melalui matrik berikut ini:

NO	Sasaran Strategis	% Rata-rata Capaian Output	Efektifitas	Pagu	% Realisasi	Persentase	Efisiensi
	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	100%	≥ 100% (efektif)	2.033.848.000	2.033.791.413	99,997%	≤ 100% (efisien)
	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	100%	≥ 100% (efektif)	-	-	-	≤ 100% (efisien)
	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	100%	≥ 100% (efektif)	-	-	-	≤ 100% (efisien)
	Terselenggaranya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	100%	≥ 100% (efektif)	66.152.000	66.152.000	100%	≤ 100% (efisien)

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Inspektorat I Kementerian Perindustrian telah menunjukkan kinerja yang optimal sepanjang tahun 2024 dalam menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program kementerian. Keberhasilan ini dapat dilihat dari capaian berbagai indikator utama yang secara umum melampaui target yang telah ditetapkan, mencerminkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi, serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam audit dan pengawasan.

Salah satu pencapaian utama yang berhasil diraih adalah peningkatan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) yang mencapai 3,688, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,00. Selain itu, Inspektorat I juga berhasil menekan batas toleransi temuan material dari BPK hingga 0,05%, jauh di bawah batas maksimum yang diperbolehkan sebesar 0,8%. Keberhasilan ini merupakan bukti bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan semakin efektif dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan keuangan dan mencegah terjadinya risiko yang lebih besar.

Dari perspektif pelayanan publik, Inspektorat I juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menindaklanjuti 100% pengaduan masyarakat yang memiliki kadar pengawasan melalui sistem SP4N-LAPOR!. Di sisi lain, dalam aspek tindak lanjut pengawasan internal, 98,73% rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti, menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan dan operasional satuan kerja yang menjadi cakupan pengawasan Inspektorat I.

Dalam hal efisiensi keuangan, Inspektorat I telah mencapai realisasi anggaran sebesar 99,99%, setelah mengesampingkan blokir anggaran, dengan tingkat efisiensi sebesar 13,62%. Efisiensi ini dicapai melalui perencanaan anggaran yang strategis, penundaan program yang tidak mendesak, serta optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung program prioritas kementerian. Selain itu, Inspektorat I juga berhasil merealisasikan 100% pemanfaatan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional

dalam mendorong pertumbuhan industri domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Namun demikian, meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi pengawasan. Meskipun Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) telah diterapkan sepenuhnya, penggunaannya masih terbatas pada pengolahan dan validasi data, sementara integrasi sistem digital yang lebih komprehensif dalam proses pemantauan dan analisis risiko masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, capaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) sebesar 3,688 masih berada di bawah nilai maksimal 4,50, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mekanisme mitigasi risiko serta meningkatkan kesadaran organisasi dalam mengelola risiko secara lebih proaktif.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah efektivitas implementasi rekomendasi pengawasan di lapangan. Meskipun tingkat tindak lanjut telah mencapai hampir 99%, masih terdapat kendala dalam penerapan nyata dari rekomendasi tersebut, terutama dalam aspek tata kelola keuangan dan kepatuhan terhadap standar pengendalian internal. Oleh karena itu, meskipun capaian Inspektorat I secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, peningkatan terhadap efektivitas implementasi rekomendasi dan optimalisasi sistem digital dalam pengawasan perlu menjadi fokus utama untuk perbaikan ke depan.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Dalam pelaksanaan pengawasan sepanjang tahun 2024, Inspektorat I menghadapi beberapa tantangan dan kendala yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ke depan. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi adalah dinamika perubahan regulasi, keterbatasan dalam integrasi teknologi pengawasan, serta tantangan dalam memastikan efektivitas tindak lanjut rekomendasi di satuan kerja.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah perubahan regulasi yang cepat, terutama dalam hal kebijakan pengelolaan keuangan negara. Regulasi yang terus berkembang menuntut Inspektorat I untuk selalu adaptif dalam menyesuaikan metode pengawasan serta memberikan asistensi yang lebih cepat kepada satuan kerja agar tetap patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Tantangan ini semakin kompleks mengingat belum semua satuan

kerja memiliki pemahaman yang memadai terkait perubahan regulasi, sehingga masih ditemukan kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang baru.

Selain itu, meskipun penggunaan teknologi dalam pengawasan telah meningkat, masih terdapat keterbatasan dalam integrasi sistem digital dalam proses audit dan pemantauan keuangan. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) telah diterapkan, tetapi pemanfaatannya dalam analisis big data serta sistem pemantauan yang lebih terintegrasi masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga lebih proaktif dalam mengidentifikasi risiko sejak dini.

Tantangan lainnya adalah dalam efektivitas implementasi rekomendasi pengawasan di lapangan. Meskipun tingkat tindak lanjut rekomendasi mencapai hampir 99%, beberapa rekomendasi masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam bentuk perbaikan nyata terhadap sistem tata kelola satuan kerja yang bersangkutan. Koordinasi antara Inspektorat I dengan unit kerja terkait masih perlu diperkuat agar tindak lanjut rekomendasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga menghasilkan dampak yang nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi.

Dari aspek sumber daya manusia (SDM), meskipun Inspektorat I telah menempatkan 100% auditor sesuai dengan kompetensinya, jumlah auditor masih perlu diperkuat untuk menghadapi volume pekerjaan yang semakin meningkat dan kompleks. Selain itu, peningkatan keterampilan auditor dalam memanfaatkan teknologi audit dan analisis risiko menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pengawasan yang lebih akurat dan berbasis data yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat I tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam berbagai aspek pengawasan. Keberhasilan dalam pencapaian Indeks MRI, efektivitas tindak lanjut pengawasan, efisiensi anggaran, serta optimalisasi penggunaan teknologi audit menjadi bukti bahwa Inspektorat I telah menjalankan perannya dengan baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien.

Namun, dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, beberapa aspek masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Peningkatan dalam pemanfaatan teknologi pengawasan, optimalisasi sistem pemantauan rekomendasi, serta penguatan kompetensi SDM auditor menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam strategi perbaikan ke depan. Selain itu, koordinasi yang lebih erat dengan unit kerja dan kementerian terkait perlu terus ditingkatkan agar setiap rekomendasi pengawasan dapat

diimplementasikan secara lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam peningkatan tata kelola organisasi.

Ke depan, Inspektorat I diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih dengan menerapkan strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan regulasi, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Inspektorat I dapat semakin memperkuat perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta mendukung pembangunan industri nasional yang lebih berdaya saing.

LAMPIRAN

NOTA DINAS

Nomor: 1992 /IJ-IND.1/PW/XII/2024

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023/2024
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Tanggal : 12 Desember 2024

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 1552/IJ-IND/ST/2024 tanggal 5 November 2024 telah dilaksanakan Penjaminan Kualitas (PK) terhadap Penilaian Mandiri (PM) atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian dengan hasil sebagai berikut:

1. Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.
2. Penilaian SPIP di lingkungan Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 direncanakan menggunakan aplikasi dari BPKP, namun karena adanya gangguan server aplikasi BPKP sehingga penilaian mengalami kemunduran yang semestinya dilaksanakan pada bulan Agustus penilaian mandiri (PM) telah selesai dilaksanakan tapi baru selesai bulan Oktober dengan penilaian secara manual menggunakan *Ms.Excel*. Penjaminan Kualitas (PK) dilakukan setelah PM selesai yaitu dilaksanakan pada bulan November 2024.
3. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Komponen	Hasil PM	Hasil PK
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,291	3,714
2.	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	4,297	3,728
3.	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	4,084	3,996
4.	Nilai Kapabilitas APIP	3,000	3,000

Perbedaan nilai disebabkan adanya koreksi terhadap hasil Penilaian Mandiri, untuk struktur dan proses yang merupakan komponen dari penilaian maturitas SPIP sebagian nilai disesuaikan karena belum ada pedoman evaluasi terpisah dan belum dilaksanakannya evaluasi tersebut.

4. Setelah dilaksanakan Penjaminan Kualitas, secara umum masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan (*Area of Improvement*) sebagai berikut:

a. Penetapan Tujuan

- Perlu dilakukan reviu atas sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran rincian output beserta indikator-indikator kinerjanya dan target indikator kinerja yang ditetapkan untuk dicapai. Reviu dilakukan antara lain terkait dengan aspek pemenuhan kriteria *specific, measurable, achievable, reliable, and time bound* (SMART) dalam penetapan indikator kinerja dan metode pengukuran yang digunakan, serta atas penetapan target indikator kinerja yang baik. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Biro Perencanaan dan masing-masing Unit Eselon I yang diharapkan dapat diselesaikan pada Desember 2024.
- Perlu dilakukan reviu atas keselarasan *cascading* sasaran strategis ke sasaran program, sasaran kegiatan hingga sasaran rincian output termasuk indikator-indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai dengan ruang lingkup masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Biro Perencanaan dan masing-masing Unit Eselon I yang diharapkan dapat diselesaikan pada Desember 2024.

b. Struktur dan Proses

- Kementerian Perindustrian saat ini telah memiliki pedoman penyelenggaraan SPIP/manajemen risiko namun belum memiliki pedoman evaluasi yang memadai, sehingga perlu segera disusun pedoman evaluasi tersebut. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Inspektorat Jenderal yang ditargetkan dapat diselesaikan pada Mei 2025.
- Saat ini telah disusun peta risiko Kementerian Perindustrian sebagai salah satu bentuk implementasi SPIP, namun perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi secara terpisah atas implementasi SPIP tersebut. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Inspektorat Jenderal yang ditargetkan dapat diselesaikan setelah pedoman evaluasi telah disusun.

c. Pencapaian Tujuan

- Perlu keselarasan dalam *cascading* sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan agar kinerja seluruh unit kerja Eselon I, Eselon II dan Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) mendukung kinerja strategis (*outcome*) yang ditetapkan untuk dicapai di tingkat Kementerian Perindustrian secara optimal. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Biro Perencanaan dan masing-masing Unit Eselon I yang diharapkan dapat diselesaikan pada Desember 2024.
- Perlu peningkatan kompetensi dan sosialisasi berbagai peraturan/SOP terkait pengelolaan/pertanggungjawaban anggaran/belanja bagi para pejabat dan pengelola keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk meminimalisir temuan berulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka menjamin keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Biro Keuangan yang ditargetkan dapat diselesaikan pada April 2025.

5. Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, kami lampirkan konsep Surat Pernyataan Telah Dilakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perindustrian. Apabila tidak ada pertimbangan

lain, mohon perkenan Bapak Inspektur Jenderal untuk menandatangani Pernyataan tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada BPKP untuk dilakukan evaluasi.

Demikian Laporan Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

§ Sekretaris Inspektorat Jenderal, 


Emil Satria

Tembusan :

1. Para Inspektur;
2. Kepala Bagian Umum Itjen;
3. Ketua Tim PK SPIP.

Lampiran I Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal

Nomor : 1992 /IJ-IND.1/PW/XII/2024

Tanggal : 12 Desember 2024

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Kementerian Perindustrian
Periode Penilaian 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		4,000		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,600	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Pengakuan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,781	3,75%		0,143		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,143		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,661	3,75%		0,137		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,500	3,75%		0,137		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,750	3,75%		0,143		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,333	3,75%		0,125		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,119		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,125	3,75%		0,119		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,833	10,00%		0,383		
Analisis Risiko (2.2)	4,000	10,00%		0,400		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4,000	2,27%		0,091		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,500	2,27%		0,080		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,250	2,27%		0,074		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	4,250	2,27%		0,097		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	4,250	2,27%		0,097		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,750	2,27%		0,085		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,750	2,27%		0,085		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,750	2,27%		0,085		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,750	2,27%		0,085		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	4,000	2,27%		0,091		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,363	5,00%		0,168		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,500	5,00%		0,175		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,583	7,50%		0,269		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,625	7,50%		0,197		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES					3,548	
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		1,064	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	4,000	20,00%		0,800		
Capaian Output	4,000	10,00%		0,400		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	4	20,00%		0,800		
IEPK	3					
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3,500		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		1,050	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,714

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)

3,728

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		1,600
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	4,000	1,600
KAPABILITAS	30,00%		1,069
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,500	0,175
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,500	0,175
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,500	0,175
KEMITRAAN	2,50%	2,750	0,069
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	3,800	0,475
HASIL	30,00%		1,059
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	3,250	0,609
OUTCOMES	11,25%	4,000	0,450
TOTAL	100,00%		3,728

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)

3,996

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,872
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	5,000	0,480
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	4,000	0,576
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	4,000	0,384
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		1,404
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	4,000	0,360
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	3,000	0,108
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	4,000	0,360
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	4,000	0,288
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	4,000	0,288
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,720
INVESTIGASI	8,00%	4,000	0,320
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	5,000	0,400
TOTAL	100,00%		3,996

KAPABILITAS APIP

3,000

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP Kementerian Perindustrian Periode Penilaian 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024		
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK LEAD I - PENETAPAN TUJUAN	Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal	: 01/SPIP.I/2024 : RA, AG, GAD / 06 Desember 2024 : ZTR / 07 Desember 2024 : TJ / 09 Desember 2024

A. Kualitas Sasaran Strategis (KK 1)

No	Uraian	KK	Bobot	Skor	Skor Akhir
1	Sasaran Strategis		100%	82,58%	82,58%
	a. Sasaran Strategis Tepat	1.1	40%	40,00%	
	b. Indikator Kinerja Tepat dan Baik	1.1	30%	21,29%	
	c. Target Kinerja Baik	1.1	30%	21,29%	
Skor Akhir					82,58%
Level					4

B. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (KK 2)

No	Uraian	KK	Bobot	Skor	Skor Akhir
1	Kualitas Sasaran Program		33,33%	87,02%	29,01%
	a. Keterkaitan dengan Sasaran Strategis K/L	2.1	30%	30,00%	
	b. Sasaran Program Tepat	2.1	30%	28,95%	
	c. Indikator Kinerja Tepat dan Baik	2.1	20%	14,39%	
	d. Target Kinerja Baik	2.1	20%	13,68%	
2	Kualitas Sasaran Kegiatan		33,33%	89,26%	29,75%
	a. Keterkaitan dengan Sasaran Program	2.2	30%	30,00%	
	b. Sasaran Kegiatan Tepat	2.2	30%	30,00%	
	c. Indikator Kinerja Tepat dan Baik	2.2	20%	16,17%	
	d. Target Kinerja Baik	2.2	20%	13,09%	
3	Kualitas Rincian Output		33,33%	92,50%	30,83%
	a. Keterkaitan dengan Sasaran Kegiatan	2.3	40%	40,00%	
	b. Indikator Kinerja Tepat dan Baik	2.3	30%	27,09%	
	c. Target Kinerja Baik	2.3	30%	25,41%	
Skor Akhir					89,59%
Level					4

Gradasi Level

- 1 < 60%
- 2 ≥ 60% dan <70%
- 3 ≥ 70% dan <80%
- 4 ≥ 80% dan <90%
- 5 ≥ 90%

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Kementerian Perindustrian
Periode Penilaian 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024

KERTAS KERJA PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
KK LEAD II - STRUKTUR DAN PROSES

Indeks KK No. : 02/SPP/3.2024
 Disusun oleh/ Tanggal : RM, AB, P, SBU, GMS, DNS, HA / 03 Desember 2024
 Direvisi oleh/ Tanggal : ZTR / 05 Desember 2024
 Disetujui oleh/ Tanggal : TJ / 09 Desember 2024

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI
				SPIP	MRI	IEPK					
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika						3,000	4,000	4,000	4,125	3,781
1.1		1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	SPIP	-	-	3,000	4,000	4,000	4,000	3,750
1.1		2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	-	IEPK				5,000	5,000
1.1		3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	SPIP	-	IEPK				3,000	3,000
1.1		4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	SPIP	-	IEPK				4,000	4,000
1.1		5	Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	SPIP	-	IEPK				4,000	4,000
1.1		6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	SPIP	-	IEPK				4,000	4,000
1.1		7	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPIP	-	IEPK				4,000	4,000
1.1		9	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian penerapan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	SPIP	-	IEPK				5,000	5,000
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi						3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1.2		1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif						3,250	3,500	3,750	4,143	3,661
1.3		1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	4,000	4,000	4,000	5,000	4,250
1.3		2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	SPIP	MRI	-	3,000	3,000	3,000	4,000	3,250
1.3		3	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPIP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750
1.3		4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja indikator penilaian penilaian kinerja	SPIP	MRI	-	3,000	4,000	4,000	4,000	3,750
		5	Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit secara memadai, baik anggaran, personil, dan sarana prasarana	SPIP	-	IEPK				3,000	3,000
		6	Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan/ mengabaikan)	SPIP	-	IEPK				4,000	4,000
		7	Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui atensi yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement, perlakuan adil, dan pengambilan keputusan yang menyertakan pertimbangan etis.	SPIP	-	IEPK				4,000	4,000
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan						3,000	4,000	4,000	3,000	3,500
1.4		1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.	SPIP	-	-	3,000	4,000	4,000	3,000	3,500
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat						4,000	4,000	4,000	3,000	3,750
1.5		1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	4,000	4,000	4,000	3,000	3,750
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						3,000	3,333	3,333	3,667	3,333
1.6		1	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	SPIP	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1.6		2	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3,000	3,000	3,000	4,000	3,250
1.6		3	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3,000	4,000	4,000	4,000	3,750
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif						3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1.7		1	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	SPIP	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						3,000	2,500	2,500	4,500	3,125
1.8		1	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	3,000	3,000	3,000	5,000	3,500
1.8		2	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	SPIP	MRI	-	3,000	2,000	2,000	4,000	2,750
2.1	Identifikasi Risiko						4,000	3,667	3,667	4,000	3,833
2.1		1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	SPIP	MRI	-	4,000	3,000	3,000	4,000	3,500
2.1		2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SPIP	MRI	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2.1		3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis instansi Pemerintah	SPIP	MRI	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2.2	Analisis Risiko						3,600	3,800	4,600	4,000	4,000
2.2		1	Seturuh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	SPIP	MRI	-	4,000	5,000	5,000	4,000	4,500
2.2		2	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	SPIP	MRI	-	4,000	5,000	5,000	4,000	4,500
2.2		3	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	SPIP	MRI	-	4,000	5,000	5,000	4,000	4,500

Kode	Uraian Subsubur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI
				SPIP	MRI	IEPK					
2.2		4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	SPIP	MRI	-	3,000	3,000	5,000	4,000	3,750
2.2		5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	SPIP	MRI	-	3,000	1,000	3,000	4,000	2,750
		6	Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan	SPIP	-	IEPK				4,000	4,000
3.1	Reviu atas Kinerja						4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3.1		1	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3.2	Pembinaan SDM						3,000	3,000	3,000	5,000	3,500
3.2		1	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	3,000	3,000	3,000	5,000	3,500
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi						3,000	3,000	3,000	4,000	3,250
3.3		1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	SPIP	-	-	3,000	3,000	3,000	4,000	3,250
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset						4,000	4,000	4,000	5,000	4,250
3.4		1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	SPIP	-	-	4,000	4,000	4,000	5,000	4,250
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja						4,000	4,000	4,000	5,000	4,250
3.5		1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	SPIP	-	-	4,000	4,000	4,000	5,000	4,250
3.6	Pemisahan Fungsi						3,000	4,000	3,000	5,000	3,750
3.6		1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	SPIP	-	-	3,000	4,000	3,000	5,000	3,750
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting						3,000	4,000	3,000	5,000	3,750
3.7		1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	SPIP	-	-	3,000	4,000	3,000	5,000	3,750
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian						3,000	4,000	4,000	4,000	3,750
3.8		1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	SPIP	-	-	3,000	4,000	4,000	4,000	3,750
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatannya						3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3.9		1	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatannya	SPIP	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatannya						3,000	4,000	4,000	4,000	3,750
3.10		1	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	3,000	4,000	4,000	4,000	3,750
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting						3,000	4,000	4,000	5,000	4,000
3.11		1	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	SPIP	-	-	3,000	4,000	4,000	5,000	4,000
4.1	Informasi yang Relevan						3,000	3,000	3,250	4,200	3,383
4.1		1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	SPIP	-	-	3,000	3,000	3,000	5,000	3,500
4.1		2	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	SPIP	MRI	-	3,000	3,000	3,000	4,000	3,250
4.1		3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	SPIP	MRI	-	3,000	3,000	3,000	5,000	3,500
4.1		4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	SPIP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500
		5	Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepedulian meningkat dan memberikan efek pengantar yang efektif.	SPIP	-	IEPK				3,000	3,000
4.2	Komunikasi yang Efektif						3,000	3,000	3,000	5,000	3,500
4.2		1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	SPIP	-	-	3,000	3,000	3,000	5,000	3,500
5.1	Pemantauan Berkelanjutan						3,333	3,667	3,667	3,667	3,583
5.1		1	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	SPIP	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5.1		2	Proses manajemen risiko telah direviu	SPIP	MRI	-	3,000	4,000	4,000	4,000	3,750
5.1		3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	SPIP	MRI	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5.2	Evaluasi Terpisah						2,000	1,000	2,500	5,000	2,625
5.2		1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APJP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	SPIP	-	-	2,000	1,000	2,000	5,000	2,500
5.2		2	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	SPIP	MRI	-	2,000	1,000	3,000	5,000	2,750

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Kementerian Perindustrian
Periode Penilaian 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024

KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
 KK LEAD III - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

Indeks KK No. : 03/SPIP.III/2024
 Disusun oleh/Tanggal : WY,AF /
 03 Desember 2024
 Direviu oleh/Tanggal : ZTR /
 04 Desember 2024
 Disetujui oleh/Tanggal : TJ /
 05 Desember 2024

No.	Indikator	Pencapaian Tujuan		Capaian K/L/D
		Definisi Indikator	Cara Pengukuran	
A Efektivitas dan Efisiensi				
1.	Capaian Outcome	Mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi	Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D	4
			Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D	4
2.	Capaian Output	Mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan	Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja	4
B Keandalan Pelaporan Keuangan				
	Opini atas Laporan Keuangan – BPK RI	Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI	Dapatkan informasi Opini Laporan Keuangan dalam 5 tahun terakhir, yang terdiri dari: - TMP - TW - WDP - WTP-DPP - WTP	3
C Pengamanan atas Aset Negara/Daerah				
	Pengamanan Aset	Penilaian atas kualitas pengamanan BMN/BMD	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir	3
D Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan				
1.	Jumlah Temuan atas Ketidapatuhan dalam LHP BPK RI	Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI	Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	4
2.	Keterjadian Tindak Pidana Korupsi	Keterjadian tindak pidana korupsi dalam tahun dan/atau saat penilaian	Mengidentifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian	Tidak

Lampiran II Surat Sekretaris Inspektoral Jenderal
 Nomor : /IJ-IND.1/PW/XII/2024
 Tanggal : Desember 2024

AOI DAN RENAKSI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
 PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023/2024

No.	Komponen/Unsur/Subunsur	No.	Area of Improvement (AoI)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status	Keterangan (Status/Kendala/Hambatan)
1 PENETAPAN TUJUAN								
1.1	Kualitas Sasaran Strategis		Perlu adanya reviu terhadap renstra masing-masing unit Eselon I	Melakukan reviu terhadap renstra masing-masing unit Eselon I	Biro Perencanaan dan masing-masing Unit Eselon I	Desember 2024	-	
1.3	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis		Perlu adanya reviu terhadap renstra masing-masing unit Eselon I	Melakukan reviu terhadap renstra masing-masing unit Eselon I	Biro Perencanaan dan masing-masing Unit Eselon I	Desember 2024	-	
2 STRUKTUR DAN PROSES								
2.1 Lingkungan Pengendalian								
2.1.2	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)		Belum ada kamus kompetensi terkait urusan perindustrian sebagai salah satu penilaian pelaksanaan sistem merit	Penyusunan Kamus dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I - IV di lingkungan Kementerian Perindustrian	Biro OSDM dan Seluruh Unit Eselon I di Kementerian	Mei 2025		
2.1.3	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)		Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi terhadap jadwal kerja WFOWFHWAFA serta pengaturan jam kerja fleksibel	Melakukan tindak lanjut/evaluasi terhadap jadwal kerja WFOWFHWAFA serta pengaturan jam kerja fleksibel, menyesuaikan arahan/edaran dan KementPANRB, atau menyesuaikan dengan kebijakan/arahan pimpinan di internal Kementerian	Biro OSDM	April 2025		
2.1.4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)		Perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan ortaker Kementerian sesuai Permenperin 8/2023	Melakukan evaluasi kelembagaan Instansi Pemerintah Kementerian	Biro OSDM dan Pimpinan Instansi di lingkungan Kementerian Perindustrian	Mei 2025		

No.	Komponen/Unsur/Subunsur	No.	Area of Improvement (Aoi)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status	Keterangan (Status/Kendala/Hambatan)
2.1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)		Perlu ada sosialisasi dan internalisasi terkait pedoman akuisisi talenta Kemenperin	Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait pedoman akuisisi talenta Kemenperin sesuai Kepmenperin 1728/2022	Biro OSDM	Mei 2025		
2.1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)		Pencapaian Kapabilitas APIP level 3 dan beberapa sub unsur level 4.	Melakukan pembahasan untuk mengidentifikasi dan merencanakan tindakan untuk memenuhi elemen-elemen pembangun IACM agar mencapai level 4 untuk setidaknya 2 dari 6 sub unsur yang dinilai.	Ijtjen	Mei 2025		
2.1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)		Perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal Kemenperin	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal Kemenperin	Biro Humas	April 2025		
2.2	Penilaian Risiko							
2.2.1	Identifikasi Risiko (2.1)		Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi atas identifikasi risiko strategis kementerian	Melakukan identifikasi risiko strategis kementerian tahun 2025 dengan mempertimbangkan peristiwa kejadian risiko strategis yang terjadi di tahun 2024	Setjen dan seluruh Unit Eselon I	Maret 2025		
2.2.2	Analisis Risiko (2.2)		Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi atas analisis risiko strategis kementerian	Melakukan analisis risiko strategis kementerian tahun 2025 dengan mempertimbangkan analisis risiko strategis di tahun 2024	Setjen dan seluruh Unit Eselon I	Maret 2025		
2.3	Kegiatan Pengendalian							
2.3.1	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)		Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi atas reviu kinerja organisasi	Melakukan tindak lanjut/evaluasi atas reviu kinerja organisasi TA 2024	Seluruh Unit Eselon I	Maret 2025		
			Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi atas reviu kinerja pegawai	Melakukan tindak lanjut/evaluasi atas reviu kinerja pegawai TA 2024	Biro OSDM	Mei 2025		

No.	Komponen/Unsur/Subunsur	No.	Area of Improvement (AoI)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status	Keterangan (Status/Kendala/Hambatan)
2.3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)		perlu adanya sistem pengembangan pegawai di Kementerian	mengimplementasikan sistem pengembangan pegawai melalui Roadmap Human Capital Development Program	Biro OSDM dan Seluruh Unit Eselon I di Kementerian	Mei 2025		
2.3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)		Perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut atas implementasi aplikasi berbasis web SAKTI yang baru sepenuhnya diimplementasikan di tahun 2022	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas implementasi aplikasi berbasis web SAKTI melalui evaluasi user pada 9 (sembilan) modul yaitu modul administrator; modul persediaan; modul bendahara; modul pembayaran; modul piutang; modul aset tetap; modul komitmen; modul general ledger dan pelaporan; dan modul penganggaran	Biro Keuangan dan Seluruh Unit Eselon I	Mei 2024		
2.3.4	Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)		Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi atas pengelolaan dan pengamanan aset di Kementerian	Melakukan tindak lanjut/evaluasi atas kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pengamanan aset di Kementerian	Seluruh Unit Eselon I	Mei 2025		
2.3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)		Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi atas rencana strategis dan SAKIP Unit Kerja di Kementerian	Melakukan tindak lanjut/evaluasi atas rencana strategis dan SAKIP di Unit-unit Kerja Kementerian	Biro Perencanaan dan masing-masing Unit Eselon I	Mei 2025		
2.3.6	Pemisahan Fungsi (3.6)		Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi terhadap pembentukan tim kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	Melakukan tindak lanjut/evaluasi terhadap pembentukan tim kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	Biro OSDM dan Seluruh Unit Eselon I di Kementerian	April 2025		
2.3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)		Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi terhadap penunjukan pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM) terkait otorisasi atas transaksi keuangan	Melakukan tindak lanjut/evaluasi terhadap penunjukan pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM) terkait otorisasi atas transaksi keuangan	Seluruh Unit Eselon I	Mei 2024		

No.	Komponen/Unsur/Subunsur	No.	Area of Improvement (Aol)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status	Keterangan (Status/Kendala/Hambatan)
2.3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)		Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi terhadap pencatatan atas transaksi dalam Laporan Keuangan dan Laporan BMN	Melakukan tindak lanjut/evaluasi terhadap pencatatan atas transaksi dalam Laporan Keuangan dan Laporan BMN	Biro Keuangan	April 2025		
2.3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)		Perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut atas implementasi aplikasi berbasis web SAKTI yang baru sepenuhnya diimplementasikan di tahun 2022	Melakukan integrasi e-Monitoring dengan aplikasi SAKTI	Biro Keuangan dan Pusdatin	Mei 2025		
2.3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)		Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi terhadap proses penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan Kemperperin	Melakukan tindak lanjut/evaluasi terhadap proses penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lingkup Sejen	Biro Keuangan dan Seluruh Unit Eselon I	April 2025		
2.3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)		Perlu adanya tindak lanjut/evaluasi/monitoring terhadap AOI SPIP dan penyimpanan bukti dukung SPIP di aplikasi berbasis web Lemari Arsip Online (LEMON)	Melakukan tindak lanjut/evaluasi/monitoring terhadap AOI SPIP dan penyimpanan bukti dukung SPIP di aplikasi berbasis web Lemari Arsip Online (LEMON)	Biro Keuangan	Mei 2025		
2.4	Informasi dan Komunikasi							
2.4.1	Informasi yang Relevan (4.1)		Perlu adanya sosialisasi/komunikasi terhadap strategi dan Kebijakan Manajemen Risiko	Melakukan sosialisasi/komunikasi terhadap strategi dan kebijakan Manajemen Risiko	Setjen, Ijten	Mei 2025		
2.4.2	Komunikasi yang Efektif (4.2)		Perlu adanya audit komunikasi untuk mengevaluasi teknik komunikasi secara umum yang dilakukan oleh Biro Humas	Melakukan audit komunikasi untuk mengevaluasi teknik komunikasi secara umum yang dilakukan oleh Biro Humas	Biro Humas	Mei 2025		
2.5	Pemantauan							
2.5.1	Pemantauan Berkelanjutan (5.1)		Pemantauan pelaksanaan pengendalian baru dilaksanakan pada sebagian aktivitas pengendalian	Pemantauan pelaksanaan pengendalian akan dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian	Biro Keuangan	Mei 2025		

No.	Komponen/Unsur/Subunsur	No.	Area of Improvement (Aoi)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status	Keterangan (Status/Kendala/Hambatan)
2.5.2	Evaluasi Terpisah (5.2)		Perlu adanya pedoman dan pelaksanaan evaluasi terpisah atas efektivitas pengendalian intern oleh pegawai yang telah bersertifikat MR dan dapat melibatkan auditor APIP yang telah bersertifikat MR	Menyusun pedoman evaluasi terpisah MR dan melakukan evaluasi terpisah atas efektivitas pengendalian intern oleh pegawai yang telah bersertifikat MR dan dapat melibatkan auditor APIP yang telah bersertifikat MR	Seluruh Unit Eselon I	Mei 2025		
3 PENCAPAIAN TUJUAN SPIP								
3.1	Efektivitas dan Efisiensi							
3.1.1	Capaian Outcome		Perlu adanya reviu terhadap renstra masing-masing unit Eselon I	Melakukan reviu terhadap renstra masing-masing unit Eselon I	Biro Perencanaan dan masing-masing Unit Eselon I	Desember 2024		
3.1.2	Capaian Output		Perlu adanya reviu terhadap renstra masing-masing unit Eselon I	Melakukan reviu terhadap renstra masing-masing unit Eselon I	Biro Perencanaan dan masing-masing Unit Eselon I	Desember 2024		
3.2	Keandalan Laporan Keuangan							
3.2.1	Opini LK		Opini Laporan Keuangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah mencapai target WTP, namun capaian tersebut perlu dipertahankan dan meminimalisir adanya temuan berulang	Melakukan pemantauan secara periodik terhadap permasalahan satker	Biro Keuangan	April 2025		
				meningkatkan kapabilitas pengelola BMN melalui bimek/ sosialisasi/pembinaan dan meningkatkan kesadaran pimpinan terhadap pentingnya pengelolaan aset dalam mewujudkan good governance	Biro Keuangan	April 2025		

No.	Komponen/Unsur/Subunsur	No.	Area of Improvement (Aol)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status	Keterangan (Status/Kendala/Hambatan)
3.3	Pengamanan atas Aset		<p>Pengendalian terhadap keamanan administrasi dapat dilakukan antara lain melalui optimalisasi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dan pengendalian dari pimpinan - Pembinaan SDM pengelola - Otorisasi dan pencatatan transaksi yang tepat 	<p>Aol : meningkatkan kesadaran pimpinan terhadap pentingnya pengelolaan BMN mulai dari perencanaan, pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pelaporan melalui kegiatan evaluasi secara berkala, pendampingan ke unit kerja, dan penyajian kebijakan/prosedur yang diperlukan</p>	Biro Keuangan, Biro Umum	April 2025		
3.4	Ketaatan pada Peraturan							
3.4.1	Temuan Ketaatan - BPK		<p>Perlu mengaktifkan SOP antikorupsi mencakup aspek edukasi, asesmen risiko, atau tematik seperti pengendalian gratifikasi dan penyusunan, WBS, dan investigasi, yang dilaksanakan secara komprehensif.</p>	<p>Kementerian akan menetapkan SOP anti korupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons yang menjangkau semua kegiatan utama dan mendukung serta direviu dan evaluasi secara berkala.</p>	Ijten	April 2025		

Keterangan:

- : diisi dengan kelemahan yang masih harus diperbaiki
- : diisi dengan rencana aksi untuk mengatasi kelemahan yang masih harus diperbaiki
- : diisi dengan pegawai/unit/satker yang bertanggung jawab untuk melaksanakan renaksi
- : diisi dengan waktu target penyelesaian renaksi
- : Belum - jika tindak lanjut belum dilakukan
Proses - jika sedang dalam proses untuk ditindaklanjuti
Selesai - jika tindak lanjut telah tuntas dilakukan
- : diisi dengan keterangan yang harus diungkap terkait status renaksi, serta hambatan/kendala yang menjadi tantangan renaksi

Keterangan (Status/Kendala/Hambatan)



NOTA DINAS
NOMOR 1/IJ-IND.3/PW/II/2025

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur II
Hal : Laporan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian melalui SP4N-LAPOR! Tahun 2024
Lampiran : 9 (sembilan) halaman
Tanggal : 2 Januari 2025

Berkenaan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola dan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2024, berikut kami sampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut tahun 2024, sebagai berikut:

1. Berdasarkan kanal pengaduan SP4N-LAPOR! www.lapor.go.id, diperoleh jumlah pengaduan masyarakat ke Kementerian Perindustrian di tahun 2024 sebanyak 101 (seratus satu) laporan pengaduan, namun hanya 79 (tujuh puluh sembilan) laporan pengaduan yang didistribusikan ke unit kerja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sebanyak 23 (dua puluh tiga) laporan pengaduan. Namun terdapat 2 (dua) laporan pengaduan yang diarsipkan baik oleh Pelapor maupun Admin Nasional SP4N Lapor karena tidak relevan dengan kinerja Kementerian Perindustrian dan 1 (satu) laporan pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi tidak lengkap laporan pengaduannya, sehingga total sebanyak 20 (dua puluh) laporan pengaduan yang didistribusikan ke unit kerja.
 - b. Triwulan II sebanyak 23 (dua puluh tiga) laporan pengaduan. Namun terdapat 5 (lima) laporan pengaduan yang diarsipkan baik oleh Pelapor maupun Admin Nasional SP4N Lapor karena tidak relevan dengan kinerja Kementerian Perindustrian dan 4 (empat) laporan pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi tidak lengkap laporan pengaduannya, sehingga total sebanyak 14 (empat belas) laporan pengaduan yang didistribusikan ke unit kerja.
 - c. Triwulan III sebanyak 34 (tiga puluh empat) laporan pengaduan. Namun terdapat 5 (lima) laporan pengaduan yang diarsipkan baik oleh Pelapor maupun Admin Nasional SP4N Lapor karena tidak relevan dengan kinerja Kementerian Perindustrian dan 2 (dua) laporan pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi tidak lengkap laporan pengaduannya, sehingga total sebanyak 27 (dua puluh tujuh) laporan pengaduan yang didistribusikan ke unit kerja.
 - d. Triwulan IV sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan pengaduan. Namun terdapat 3 (tiga) laporan pengaduan yang diarsipkan baik oleh Pelapor maupun Admin Nasional SP4N Lapor karena tidak relevan dengan kinerja Kementerian Perindustrian, sehingga total sebanyak 18 (delapan belas) laporan pengaduan yang didistribusikan ke unit kerja.

2. Jenis laporan pengaduan yang didistribusikan ke unit kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pengaduan tidak berkadar pengawasan : 26 (dua puluh enam) laporan;
 - b. Permintaan informasi : 41 (empat puluh satu) laporan;
 - c. Aspirasi : 12 (dua belas) laporan.
3. Status Tindak Lanjut atas 79 (tujuh puluh sembilan) laporan pengaduan berdasarkan unit kerja dan rekapitulasi kinerjanya sebagai berikut:

Unit Kerja	Belum TL	Proses	Selesai	Total	%TL*	RTL**
Setjen	1	1	16	18	94,4	2,1
Pusdatin	0	1	16	17	100	0,9
Ditjen ILMATE	0	2	13	15	100	5,4
BSKJI	0	0	6	6	100	4
Ditjen KPAIL	0	0	6	6	100	9,4
PPPPDN	0	0	6	6	100	4,2
Ditjen IKFT	1	0	4	5	80	4
BPSDMI	0	0	3	3	100	9
Ditjen IKMA	0	0	3	3	100	3,5
Verifikator	0	0	7	7	100	0,7

Nb. *Persentase Tindak Lanjut adalah jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total laporan pengaduan yang terdisposisi ke unit kerja.

**Rata-rata Tindak Lanjut adalah rata-rata jumlah hari unit kerja menindaklanjuti laporan pengaduan yang terdisposisi.

- a. Terdapat 2 (dua) laporan pengaduan yang belum ditindaklanjuti, yaitu 1 (satu) laporan baru masuk pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 dan terdisposisi ke Sekretariat Jenderal tanggal 30 Desember 2024. Sementara 1 (satu) laporan lainnya masuk ke Admin Nasional SP4N Lapor tanggal 23 Desember 2024, namun baru terdisposisi ke Kementerian Perindustrian tanggal 27 Desember 2024 dan terdisposisi ke Ditjen IKFT tanggal 30 Desember 2024.
- b. Apresiasi diberikan kepada Tim Verifikator/ Tim Pengelola SP4N Lapor dari Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah melakukan verifikasi terhadap laporan pengaduan dengan rata-rata verifikasi tidak sampai 1 hari (0,7) dan unit kerja Pusdatin yang telah menindaklanjuti laporan pengaduan dengan rata-rata tindak lanjut tidak sampai 1 hari (0,9).
- c. Perlunya peningkatan responsivitas tindak lanjut laporan pengaduan pada unit kerja Ditjen KPAIL dan BPSDMI dengan rata-rata tindak lanjut 9 hari di tahun 2024.

- d. Perlunya peningkatan substansi dalam menindaklanjuti laporan pengaduan yang terdisposisi.
4. Seluruh laporan pengaduan di atas telah dikomunikasikan dengan Pimpinan dan Admin Unit Kerja yang bersangkutan. Apresiasi diberikan kepada Tim Verifikator dan Admin Unit Kerja yang telah melakukan verifikasi dan tindak lanjut atas laporan pengaduan yang diterima Kementerian Perindustrian di tahun 2024.

Demikian kami laporkan, atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Inspektur II,



Winky Angga Priatna

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur I;
3. Inspektur III;
4. Inspektur IV.

Lampiran Nota Dinas Inspektur II

Nomor : 1/IJ-IND.3/PW/II/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Judul Laporan
Nama Instansi
Tanggal *Generate*
Periode Masuk
Pengelola

Laporan Ringkas
Kementerian Perindustrian
2025-01-01
(2024-01-01) - (2024-12-31)

No	Tracking ID	Tanggal Lapor	Klasifikasi Laporan	Judul Laporan	Instansi Terdisposisi	Status Laporan	Alasan Tunda/Arsip	Provinsi	Kota/Kabupaten
1	7170148	4 Jan 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Iphone X Saya Imei Nya Diblokir Padahal Beli Di Ibox	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
2	7284940	8 Jan 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Rice Cooker Tanpa Sni	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Pusat
3	7285270	8 Jan 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Rice Cooker Tanpa Sni	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Pusat
4	7299571	2 Jan 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Verifikasi Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha (Resiko Tinggi) Siinas	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Sistem		Jawa Timur	
5	7306366	3 Jan 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Membeli Kendaraan Electric Bersubsidi	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Sistem		Sumatera Barat	Kota Padang
6	7315030	11 Jan 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Rice Cooker Sni	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Utara
7	7335217	10 Jan 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pembatasan Pendaftaran Antrian Untuk Konsultasi Tatap Muka Di Upp Kementerian Perindustrian	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
8	7345003	13 Jan 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2024		Diarsipkan oleh Pelapor	Laporan ini diarsipkan sesuai dengan keinginan Pelapor	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan

No	Tracking ID	Tanggal Lapor	Klasifikasi Laporan	Judul Laporan	Instansi Terdisposisi	Status Laporan	Alasan Tunda/Arsip	Provinsi	Kota/Kabupaten
9	7353910	15 Jan 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Laporan Belum terselesaikan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Ditutup oleh Pelapor		Jawa Tengah	Kendal
10	7357150	16 Jan 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Laporan Siinas Tidak Kunjung Selesai	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Kota Depok
11	7357162	16 Jan 2024	Permintaan Informasi	Tkdn Gratis Untuk 2024	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Kota Depok
12	7402282	28 Jan 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kenapa Mau Kredit Motor Listrik Subsidi Syarat Susah Sekali	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Timur
13	7448104	15 Feb 2024	Permintaan Informasi	Kehilangan barang		Diarsipkan oleh Admin	Laporan ini diarsipkan karena Mengandung SARA, Tidak Memiliki Bukti Dukung, Tidak Jelas, dan Tidak Relevan dengan Kinerja Pemerintah	Jawa Barat	Sukabumi
14	7457383	17 Feb 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pembatalan Setelah Pengumuman Diterima PPPK	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Pusat
15	7460302	21 Feb 2024	Aspirasi	Perlu Website Penampung Aspirasi Kreatifitas Mebel	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Sistem		Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul
16	7493302	28 Feb 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Proses Pengajuan Izin Di Siinas Lama	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
17	7494460	5 Mar 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Perbaikan Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Standar Oss Belum Terverifikasi Kbli 11052	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Ditutup oleh Sistem		Sulawesi Selatan	Kota Makassar
18	7501744	4 Mar 2024	Aspirasi	Saran	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Admin		Kalimantan Selatan	Barito Kuala
19	7550065	14 Mar 2024	Permintaan Informasi	Konfirmasi Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Pi Katup Dan Konsultasi Tatap Muka	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Utara

No	Tracking ID	Tanggal Lapor	Klasifikasi Laporan	Judul Laporan	Instansi Terdisposisi	Status Laporan	Alasan Tunda/Arsip	Provinsi	Kota/Kabupaten
20	7553719	19 Mar 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Perizinan Lambat Diproses	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Ditutup oleh Admin		Sulawesi Tengah	Kota Palu
21	7583737	26 Mar 2024	Aspirasi	Perhubungan P.t. Mobil Minimalis	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Pelapor		Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul
22	7584790	21 Mar 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Sudah 1 Bulan, Pengajuan E-Licensing Di Siinas Belum Ada Perkembangan	Verifikator	Ditutup oleh Sistem		Jawa Tengah	Temanggung
23	7610141	24 Mar 2024	Permintaan Informasi	Program Integrasi Garam	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Ditutup oleh Admin		Jawa Barat	Indramayu
24	7663979	2 Apr 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Di Reject Registrasi Akun Di Siinas (Sistem Informasi Industri Nasional)	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Pelapor		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Pusat
25	7665561	2 Apr 2024	Permintaan Informasi	Layanan Publik Kementerian Perindustrian RI	Verifikator	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Pusat
26	7668171	3 Apr 2024	Permintaan Informasi	Surat Pengecualian Berada Di Kawasan Industri	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Bogor
27	7687947	11 Apr 2024	Permintaan Informasi	Melacak lokasi IMEI Android		Diarsipkan oleh Admin	Laporan ini diarsipkan karena Mengandung SARA, Tidak Memiliki Bukti Dukung, Tidak Jelas, dan Tidak Relevan dengan Kinerja Pemerintah	Sumatera Utara	Serdang Bedagai
28	7726747	30 Apr 2024	Permintaan Informasi	Tidak Bisa Melakukan Pengajuan Permohonan	Verifikator	Ditutup oleh Sistem		Sumatera Utara	Kota Medan
29	7727314	30 Apr 2024	Permintaan Informasi	Penggunaan Las Argon Di Manufaktur Apakah Diperbolehkan?	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Bekasi
30	7740514	5 May 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Memblokir Imei Handphone		Diarsipkan oleh Admin	Laporan ini diarsipkan karena Mengandung SARA, Tidak Memiliki Bukti Dukung, Tidak Jelas, dan Tidak Relevan dengan Kinerja Pemerintah	Daerah Istimewa Yogyakarta	

No	Tracking ID	Tanggal Lapor	Klasifikasi Laporan	Judul Laporan	Instansi Terdisposisi	Status Laporan	Alasan Tunda/Arsip	Provinsi	Kota/Kabupaten
31	7740685	5 May 2024	Permintaan Informasi	Cek Lokasi Gadget Hilang Dengan Imei		Diarsipkan oleh Admin	Laporan ini diarsipkan karena Mengandung SARA, Tidak Memiliki Bukti Dukung, Tidak Jelas, dan Tidak Relevan dengan Kinerja Pemerintah	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Timur
32	7742692	16 May 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Penerbitan Skhp Metrologi Legal	Verifikator	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Kota Bandung
33	7745290	7 May 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Sangahan Lelang Berkaitan Dengan TKDN	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Ditutup oleh Sistem		Jawa Tengah	Kota Magelang
34	7748797	8 May 2024	Aspirasi	Perihal: Usulan Pembuatan Pemetaan Koneksi Perusahaan Dan Bumh Untuk Percepatan Hilirisasi	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Admin		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
35	7762714	15 May 2024	Aspirasi	Aspirasi Agar Perkembangan Kendaraan Listrik Lebih Cepat	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Sistem		Jawa Timur	Kota Mojokerto
36	7782145	22 May 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Tertipu retail kendraan <i>electric</i>		Diarsipkan oleh Admin	Laporan ini diarsipkan karena Mengandung SARA, Tidak Memiliki Bukti Dukung, Tidak Jelas, dan Tidak Relevan dengan Kinerja Pemerintah	Sumatera Barat	Kota Padang
37	7793632	27 May 2024	Permintaan Informasi	Reset Password Siinas	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Sistem		Jawa Tengah	Kota Semarang
38	7829422	6 Jun 2024	Permintaan Informasi	Perihal Biaya Sni Tahunan / Audit Tahunan	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Ditutup oleh Sistem		Sumatera Utara	Kota Medan
39	7830610	6 Jun 2024	Permintaan Informasi	Registrasi Siinas	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Admin		Jawa Timur	Kediri
40	7843030	10 Jun 2024	Permintaan Informasi	Susah Dihubungi	Verifikator	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
41	7848430	11 Jun 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	ChatGPT "Kisah Ketidakpuasan: Pengalaman Perbaikan Peralatan Rumah Tangga yang Kurang Jelas dan Tidak Memuaskan		Diarsipkan oleh Pelapor	Laporan ini diarsipkan sesuai dengan keinginan Pelapor	Jawa Tengah	Rembang

No	Tracking ID	Tanggal Lapo	Klasifikasi Laporan	Judul Laporan	Instansi Terdisposisi	Status Laporan	Alasan Tunda/Arsip	Provinsi	Kota/Kabupaten
42	7864435	16 Jun 2024	Aspirasi	Kemenperin, Silakan Biayai Industri Pangan Kecil Untuk "Update Teknologi".	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Pelapor		Jawa Barat	Kota Bandung
43	7868650	17 Jun 2024	Aspirasi	Very Nice.	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Pelapor		Jawa Barat	Kota Bandung
44	7870540	18 Jun 2024	Permintaan Informasi	Cek Imei Hp	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Sistem		Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir
45	7877821	20 Jun 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Registrasi Akun Siinas	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Bekasi
46	7913509	29 Jun 2024	Permintaan Informasi	Penerapan Tkdn Tender Jasa Konstruksi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Ditutup oleh Sistem		Sulawesi Barat	Mamuju
47	7921321	2 Jul 2024	Permintaan Informasi	Daftar Produk Yang Wajib Memiliki Sertifikat Sni	Verifikator	Ditutup oleh Sistem		Banten	Tangerang
48	7926439	3 Jul 2024	Permintaan Informasi	Tanggapan Dari Siinas, Lama	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Sistem		Jawa Timur	Kota Surabaya
49	7960255	12 Jul 2024	Permintaan Informasi	Laporan Melalui Whatsapp Tidak Ditangani	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Sistem		Jawa Timur	Kota Surabaya
50	7967542	14 Jul 2024	Aspirasi	Langkah Bagus Kemenperin.	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Pelapor		Jawa Barat	Kota Bandung
51	7971286	15 Jul 2024	Permintaan Informasi	Registrasi Akun Siinas	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Sistem		Banten	Tangerang
52	7975654	16 Jul 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Bis Kemenperin Ugal"An	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
53	7988704	18 Jul 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Progres Pengajuan TKDN yang tidak jelas statusnya		Diarsipkan oleh Pelapor	Laporan ini diarsipkan sesuai dengan keinginan Pelapor	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
54	7990111	29 Jul 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Sni Ilegal	Verifikator	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Utara
55	7991881	19 Jul 2024	Permintaan Informasi	Ketidakjelasan Status Progres Pengajuan Tkdn Oleh Kemenperin	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
56	7992079	19 Jul 2024	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Ikm 2024 - Kementerian Perindustrian Ri	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Subang

No	Tracking ID	Tanggal Lapor	Klasifikasi Laporan	Judul Laporan	Instansi Terdisposisi	Status Laporan	Alasan Tunda/Arsip	Provinsi	Kota/Kabupaten
57	8009782	24 Jul 2024	Permintaan Informasi	Tidak Menerima Email Registrasi Akun Siinas	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Sistem		Jawa Timur	Kota Surabaya
58	8016355	25 Jul 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Petugas Pelayanan Di Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian Mencoba Memeras Pelaku Usaha	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
59	8060845	7 Aug 2024	Permintaan Informasi	Proses Penerbitan Tkdn	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Ditutup oleh Sistem		Jawa Timur	Sidoarjo
60	8080888	11 Aug 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Kemenperin, silakan UMKM, "DIBINA".		Diarsipkan oleh Admin	Laporan ini diarsipkan karena Mengandung SARA, Tidak Memiliki Bukti Dukung, Tidak Jelas, dan Tidak Relevan dengan Kinerja Pemerintah	Jawa Tengah	Jebara
61	8090839	14 Aug 2024	Permintaan Informasi	Pergantian Email Baru	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Sistem		Aceh	Kota Banda Aceh
62	8092600	15 Aug 2024	Aspirasi	Pelayanan Publik Kemenperin	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Bekasi
63	8103859	19 Aug 2024	Permintaan Informasi	Sk Pengecualian Berlokasi Di Kawasan Industri Belum Disetujui (Hampir 2 Bulan)	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
64	8111770	22 Aug 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cv. Indo Jati Furniture (Jebara), Perlu "Dibina".	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	Ditutup oleh Admin		Jawa Tengah	Jebara
65	8116702	23 Aug 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kendala Pelaporan Slinas Semester Ganjil Tahun 2024	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Admin		Jawa Tengah	Kota Surakarta
66	8121091	27 Aug 2024	Permintaan Informasi	Seleksi Jpt Madya Tidak Fair	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
67	8121442	27 Aug 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pungutan Liar Status Komite Sekolah		Diarsipkan oleh Pelapor	Laporan ini diarsipkan sesuai dengan keinginan Pelapor	Sulawesi Selatan	Kota Makassar
68	8123125	28 Aug 2024	Permintaan Informasi	Persyaratan Toefl Untuk Pendaftaran Cpns 2024	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Admin		Jawa Barat	Kuningan
69	8146879	6 Sep 2024	Permintaan Informasi	Persyaratan Pendirian Pabrik Kursi Gigi dan biaya pengurusannya		Diarsipkan oleh Pelapor	Laporan ini diarsipkan sesuai dengan keinginan Pelapor	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Pusat

No	Tracking ID	Tanggal Lapor	Klasifikasi Laporan	Judul Laporan	Instansi Terdisposisi	Status Laporan	Alasan Tunda/Arsip	Provinsi	Kota/Kabupaten
70	8146912	6 Sep 2024	Permintaan Informasi	Persyaratan Pendirian Pabrik Kursi Gigi Dan Biaya Pengurusannya	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Admin		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Pusat
71	8161567	10 Sep 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Dugaan Pemalsuan Absensi/Kehadiran Pegawai	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
72	8167111	23 Sep 2024	Permintaan Informasi	Penambahan Titik Koordinat Lokasi Pada Akun Siinas	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Admin		Bali	Badung
73	8186158	17 Sep 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Harga Modul Anti Lock Braking System (ABS) Motor Sangat Mahal		Diarsipkan oleh Admin	Laporan ini diarsipkan karena Mengandung SARA, Tidak Memiliki Bukti Dukung, Tidak Jelas, dan Tidak Relevan dengan Kinerja Pemerintah	Jawa Barat	
74	8199958	21 Sep 2024	Permintaan Informasi	Website Siinas Tidak Mendukung Pengiriman Data	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Admin		Riau	Kota Pekanbaru
75	8206342	23 Sep 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Lambat Nya Proses Kemenperin	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Ditutup oleh Admin		Jawa Barat	
76	8207983	23 Sep 2024	Permintaan Informasi	Lambatnya Kemenperin	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Ditutup oleh Admin		Jawa Barat	
77	8211955	24 Sep 2024	Permintaan Informasi	Penyalahgunaan Wewenang Atau Kekuasaan Verifikator Dalam Seleksi Administrasi Cpns 2024	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Admin		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
78	8222068	27 Sep 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Eksplorasi Data Mahasiswa Pada Salah Satu Institusi Pendidikan Dibawah Naungan Kementerian Perindustrian	Politeknik APP Jakarta	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
79	8229445	30 Sep 2024	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi Program Studi Manajemen Produksi Akademi Pimpinan Perusahaan Yang Tidak Terdaftar Di Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 27/D/M/2022	Politeknik APP Jakarta	Ditutup oleh Admin		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Barat
80	8229844	30 Sep 2024	Aspirasi	Kerentanan Website Kemenperin	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	

No	Tracking ID	Tanggal Lapor	Klasifikasi Laporan	Judul Laporan	Instansi Terdisposisi	Status Laporan	Alasan Tunda/Arsip	Provinsi	Kota/Kabupaten
81	8234437	4 Oct 2024	Permintaan Informasi	Faktual Kualitas Barang Tidak Sesuai Dengan Hasil Uji	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	Ditutup oleh Admin		Jawa Barat	Karawang
82	8242765	3 Oct 2024	Permintaan Informasi	Isu Mengenai Deindustrialisasi Di Indonesia	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Admin		Jawa Barat	Kota Depok
83	8301394	23 Oct 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Konsultasi Mengenai Ada Pelanggaran Kode Etik Asn Atau Tidak	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Kota Bogor
84	8316712	28 Oct 2024	Aspirasi	Saran Buat Semua Industri	Sekretariat Jenderal	Ditanggapi oleh Pelapor		Kalimantan Selatan	Barito Kuala
85	8320369	29 Oct 2024		Tetsing bimtek TL	Tim SP4N-LAPOR! Kemenperin	Diarsipkan oleh Admin	Laporan ini diarsipkan karena Mengandung SARA, Tidak Memiliki Bukti Dukung, Tidak Jelas, dan Tidak Relevan dengan Kinerja Pemerintah		
86	8340862	5 Nov 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Permohonan Blacklist Nomor Iml HP yang diambil orang tidak dikenal		Diarsipkan oleh Pelapor	Laporan ini diarsipkan sesuai dengan keinginan Pelapor	Sumatera Utara	Kota Medan
87	8345383	13 Nov 2024	Permintaan Informasi	Produk Non Sni	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Utara
88	8348437	7 Nov 2024	Aspirasi	Saran Mobil Listrik Dan Mobil Listrik Dll	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditanggapi oleh Pelapor		Kalimantan Selatan	Barito Kuala
89	8363193	14 Nov 2024	Permintaan Informasi	Pengajuan Tkdn Lama Tidak Berhasil	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Ditutup oleh Sistem		Jawa Tengah	Kota Semarang
90	8363753	14 Nov 2024	Permintaan Informasi	Pelayanan Permohonan Surat Pertek Bmtb Melebihi Dari Standar Layanan	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Karawang
91	8373941	18 Nov 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Kapan subsidi motor listrik cashbacknya?		Diarsipkan oleh Admin	Laporan ini diarsipkan karena Mengandung SARA, Tidak Memiliki Bukti Dukung, Tidak Jelas, dan Tidak Relevan dengan Kinerja Pemerintah	Jawa Barat	Bogor

No	Tracking ID	Tanggal Lapor	Klasifikasi Laporan	Judul Laporan	Instansi Terdisposisi	Status Laporan	Alasan Tunda/Arsip	Provinsi	Kota/Kabupaten
92	8377125	18 Nov 2024	Permintaan Informasi	Pengajuan Perizinan / Rekomendasi Teknis Di Kementerian Perindustrian Yang Lama.	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
93	8384101	20 Nov 2024	Permintaan Informasi	Surat Balasan 1 Bulan Belum Ada Jawaban	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Sistem		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan
94	8386741	21 Nov 2024	Permintaan Informasi	Kesalahan Pendaftaran Email Akun Siinas	Pusat Data dan Informasi	Ditutup oleh Sistem		Jawa Timur	Kota Surabaya
95	8399611	28 Nov 2024	Permintaan Informasi	Nomor Kemenprin Yang Bisa Dihubungi	Sekretariat Jenderal	Ditutup oleh Sistem		Banten	Kota Tangerang
96	8434846	6 Dec 2024	Permintaan Informasi	Proses Permohonan Dispensasi Import Bmtb Yang Terlalu Lama	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Karawang
97	8438586	7 Dec 2024	Permintaan Informasi	Prosedur Pembubaran Perusahaan & Penutupan Akun Siinas	Pusat Data dan Informasi	Ditindaklanjuti oleh Instansi		Jawa Timur	Malang
98	8445696	9 Dec 2024	Permintaan Informasi	Lambatnya Tracking Pemrosesan	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Ditutup oleh Sistem		Jawa Barat	Kota Bekasi
99	8468706	17 Dec 2024	Permintaan Informasi	Pengajuan Pi Besi Baja Periode Tahun 2025	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditindaklanjuti oleh Instansi		Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Barat
100	8489531	23 Dec 2024	Permintaan Informasi	Regulasi Impor	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Terverifikasi*		Riau	Kota Pekanbaru
101	8503066	28 Dec 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Pppk Tahun 2024	Sekretariat Jenderal	Terverifikasi*		Sumatera Utara	Kota Medan

*Status Laporan Pengaduan Belum Ditindaklanjuti

Inspektur II,



Winky Angga Priatna